

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
(Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di
Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

ERINA MILATA EL HASNA

1906016135

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Erina Milata El Hasna

NIM : 1906016135

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 16 Mei 2023

Pembimbing Bidang
Substansi Materi Metodologi
Dan Tata Tulis



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

**PENGESAHAN SKRIPSI
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN**

**(Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di
Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang)**

Disusun Oleh:

Erina Milata El Hasna

1906016135

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 30 Mei 2023
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Moh Khasan, M.Ag

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 197412122003121004

NIP. 196805051995031003

Penguji I

Pembimbing

Moh. Yamin Darsyah, M.Si.

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 198409092019031007

NIP. 196805051995031003

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)”**, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 03 Juni 2023

Deklarator

Erina Milata El Hasna

NIM. 1906016135

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah WaSyukurilah, AsyhaduAllailahailallah Wa Asyhaduanna Muhammadarrasulullah, Allahumma Sholiala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Atas semua rahmat yang dilimpah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul **PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)**. Skripsi ini merupakan syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana strata-1 di UIN Walisongo Semarang yang berbentuk karya ilmiah

Penulis sangat menyadari bahwa memiliki keterbatasan dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Jika tidak adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan nasehat maka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Harapan kecil penulis tentunya skripsi ini mampu melihat dan membuka cara pandang baru dalam berfikir realitas sosial kehidupan dalam kelompok masyarakat, khususnya pada contoh perempuan di Dusun Kalisidi dan seluruh perempuan di Indonesia dan semoga bisa memberikan sebuah manfaat bagi pembaca amin allahumma amin.

Skripsi ini telah dibuat oleh penulis dengan penuh semangat sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu bersedia dan berbesar hati membimbing, membina, memotivasi, memberikan saran, meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Moh. Yamin Darsyah, M.Si selaku dosen wali saya yang telah bersedia dan berbesar hati mengayomi dan mendidik saya selama mengenyam pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan, mendidik, membimbing dan membekali penulis ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
6. Seluruh staffendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu penulis proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Pemerintah Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian kepada warga Dusun Kalisidi guna memenuhi tugas akhir sehingga penulis mendapat informasi yang dapat mendukung penelitian ini.

Sesungguhnya apa yang telah saya capai pada saat ini, adalah suatu bentuk dukungan yang mereka berikan dan penulis meyakini mereka semua pasti akan mendapatkan manfaat dikemudian hari. Tentu saja masih ada berbagai pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis, dengan demikian penulis mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Penulis juga dengan secara khusus meminta maaf terhadap seluruh pihak yang bersangkutan diatas karena penulis pastinya tidaklah luput dari suatu bentuk kesalahan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 03 Juni 2023

Deklarator

Erina Milata El Hasna

NIM. 1906016135

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Terimakasih kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Drs. Sugiyanto, M.H, seseorang yang biasa saya panggil ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kemalasan. Terimakasih telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang, selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih atas kerja kerasmu dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini. Saya persembahkan karya kecil ini untukmu.
2. Siti Chasbandiyah, A.Md.Keb, perempuan hebat yang biasa saya panggil ibu yang selalu menjadi penyemangat dan tempat untuk berkeluh kesah dari proses pembuatan karya tulis ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untukmu. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta.
3. Kakak Rosma Amalia El Hasna, S.H, adik laki-laki saya Zaky Mumtaaza Ahmad, dan adik perempuan Adliya Shofiya Kamila yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, dan semangat yang tiada tara.
4. Jodoh yang sudah diatur oleh Allah SWT yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz.

MOTTO

“Tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan, tanpa melibatkan perempuan.”

(Najwa Shihab)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang mana partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi terbilang cukup rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan lebih mendalam terkait pembahasan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi dan relasi kuasa dan aksen perempuan dalam politik desa. Adapun dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana partisipasi dan akses perempuan dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang? (2) Bagaimana relasi kuasa dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlokasi di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk mempelajari fenomena yang akan terjadi pada subjek penelitian di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan yang masih rendah di Dusun Kalisidi disebabkan karena adanya budaya patriarki yang juga dilanggengkan oleh masyarakat dusun Kalisidi (2) Relasi kuasa yang terjalin antara tokoh masyarakat dengan pemimpin dusun menciptakan kepemimpinan yang kurang seimbang hal tersebut menjadikan kepemimpinan di Dusun Kalisidi bersifat dominatif yang berpusat pada tokoh masyarakat selaku representasi laki-laki.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Relasi Kuasa, Politik Desa

ABSTRACT

This research is motivated by women's political participation in Kalisidi Hamlet, Kalisidi Village, West Ungaran District, Semarang Regency, where women's political participation in Kalisidi Hamlet is quite low. This research aims to reveal more deeply related to the discussion of women's political participation in Kalisidi Hamlet and the power relations and accents of women in village politics. There are two problems in this study, namely (1) How is women's participation and access in village politics in Kalisidi Hamlet, Kalisidi Village, West Ungaran Subdistrict, Semarang Regency? (2) How are power relations in village politics in Kalisidi Hamlet, Kalisidi Village, West Ungaran Subdistrict, Semarang Regency?

This research is a qualitative study with a case study approach located in Kalisidi Hamlet, Kalisidi Village, West Ungaran Subdistrict, Semarang Regency with the aim of studying the phenomena that will occur in the research subject in the field. Data collection in this study used participant observation techniques, interviews and documentation. Data analysis was carried out with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing using Michel Foucault's Power Relations theory.

The results showed that: (1) Women's political participation is still low in Kalisidi Hamlet due to the patriarchal culture that is also perpetuated by the people of Kalisidi Hamlet (2) The power relations that exist between community leaders and hamlet leaders create an unbalanced leadership that makes leadership in Kalisidi Hamlet dominative, centered on community leaders as male representatives.

Keywords: Political Participation, Power Relations, Village Politics

خلاصة

هذا البحث مدفوع بالمشاركة السياسية للمرأة في كاليسيدي هاملت ، قرية كاليسيدي ، مقاطعة غرب أنغاران ، ريجنسي سيمارانج ، حيث المشاركة السياسية للمرأة في كاليسيدي هاملت منخفضة للغاية. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف بشكل أعمق عن مناقشة المشاركة السياسية للمرأة في كاليسيدي هاملت وعلاقات القوة واللهجة النسائية في السياسة القروية. هناك مشكلتان في هذه الدراسة ، وهما (1) كيف يتم مشاركة ووصول المرأة في السياسة القروية في كاليسيدي هاملت ، قرية كاليسيدي ، مقاطعة أنغاران الغربية ، سيمارانج ريجنسي؟ (2) كيف هي علاقات القوة في السياسة القروية في كاليسيدي هاملت ، قرية كاليسيدي ، منطقة غرب أنغاران ، ريجنسي سيمارانج؟

هذا البحث هو بحث نوعي مع نهج دراسة حالة يقع في كاليسيدي هاملت ، قرية كاليسيدي ، منطقة غرب أنغاران ، سيمارانج ريجنسي بهدف دراسة الظواهر التي ستحدث لموضوعات البحث في هذا المجال. جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات على ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج باستخدام نظرية علاقات القوة لميشيل فوكو.

تظهر نتائج الدراسة أن: (1) انخفاض المشاركة السياسية للمرأة في كاليسيدي هاملت ناتج عن الثقافة الأبوية هي القيادة Dusun Kalisidi التي ترسخ أيضاً من قبل مجتمع قرية كاليسيدي. القيادة التي تجعل القيادة في المهيمنة ، وتتركز على قادة المجتمع كممثلين ذكور.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ، علاقات القوة ، سياسة القرية

DAFTAR PUSTAKA

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
خلاصة	xi
DAFTAR PUSTAKA	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II TEORI PARTISIPASI DAN RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT	25
A. Partisipasi Politik dalam Pandangan Michel Foucault	25
B. Relasi Kuasa dalam Pengetahuan	26

BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KABUPATEN SEMARANG DAN GAMBARAN KHUSUS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG.....	35
A. Profil Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	35
1. Letak Geografis Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi. Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	35
2. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	37
B. Partisipasi Politik Perempuan Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	43
BAB IV PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN AKSES PEREMPUAN DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KABUPATEN SEMARANG	48
A. Partisipasi Politik Perempuan dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	48
B. Analisis Mengkaitkan dengan Teori Michel Foucault	66
BAB V RELASI KUASA DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG.....	71
A. Kekuasaan dalam Pengetahuan Menurut Michel Foucault	71
B. Relasi Kuasa Antara Pemimpin Dusun dengan Tokoh Masyarakat Dusun Kalisidi	73
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

Daftar Pustaka	89
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	4
Tabel 1. 2	5
Tabel 1. 3	20
Tabel 3. 1	38
Tabel 3. 2	38
Tabel 3. 3	40
Tabel 3. 4	43
Tabel 4. 1	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	51
Gambar 4. 2	52
Gambar 4. 3	53
Gambar 4. 4	54
Gambar 4. 5	55
Gambar 4. 6	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi merupakan suatu hal yang penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana istilah yang sering dilontarkan bahwa, kekuasaan negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang memiliki arti ialah kekuasaan penuh negara yang menganut sistem demokrasi ada pada kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan mengkehendaki dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Seperti halnya di Indonesia, dalam berdemokrasi, rakyat yang memiliki kendali utuh atas birokrasi pemerintahan tersebut termuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan sepenuhnya dilaksanakn menurut UUD ini”.

Dalam proses politik, perempuan juga memiliki kedudukan yang setara untuk terlibat di berbagai kegiatan politik lainnya terutama dalam partisipasi politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi merupakan suatu hal yang vital karena dalam partisipasi, kesadaran masyarakat akan menjadi sesuatu yang penting untuk kemajuan dan juga kebaikan bersama. Dengan ikut sertanya perempuan dalam proses dan kegiatan politik, hal tersebut akan menunjuka bahwa perempuan juga berdaya dan mampu ikut andil dan juga sadar akan pentingnya kegiatan-kegiatan politik yang berjalan. Semakin sadar seseorang terhadap isu-isu politik dan juga ikut parrisipasi aktif dalam proses politik maka, akan semakin tinggi juga tingkat keabsahan legitimasi suatu pemerintahan tersebut. Selain itu, partisipasi yang aktif juga dapat mempengaruhi sikap/sifat serta Tindakan para penguasa dalam proses politik tak terkecuali dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Budiarjo (2010) mendefiniskan bahwasanya partisipasi politik adalah sebagai tindakan atau kegiatan seseorang maupun

sekelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut bisa berupa berpartisipasi dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mentaati peraturan pemerintah, mengadakan suatu kegiatan/mempunyai suatu hubungan dengan pejabat pemerintah/parlemen, dll.

Relasi kuasa merupakan sebuah hubungan antara seseorang ataupun kelompok dengan kelompok lainya berdasarkan ideologi tertentu. Dalam konteks relasi kuasa, terdapat adanya hubungan sosial seperti seorang aktor yang mempunyai kemampuan guna mengubah perilaku maupun pola fikir aktor lainnya. Relasi kuasa juga memiliki pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan keinginan ataupun kepentingan seseorang.

Menurut Foucault (1997), konsep kekuasaan adalah suatu dimensi dan juga relasi, dimana relasi dan kekuasaan mempunyai keterikatan yang dekat. Relasi kuasa selalu dilekatkan oleh setiap proses politik. Relasi kuasa sendiri merupakan buah dari proses politik. Kekuasaan sendiri bukanlah dimiliki atau milik seorang aktor tapi merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan yang akan ditargetkan. Selain itu kekuasaan juga berkaitan dengan strategi dan juga praktek dalam sebuah ruang lingkup yang mana terdapat adanya beberapa posisi yang secara tidak lain berkaitan satu sama lain.

Menurut Foucault (1972) pengertian dari kekuasaan itu sendiri adalah soal praktik-praktik konkrit yang akan menghasilkan wilayah objek pengetahuan, ritual kebenaran yang unik, serta realitas dan pola perilaku. Kekuasaan juga merupakan kemampuan seseorang atau bahkan kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar tingkah laku atau perilaku tersebut sejalan dengan keinginan dan tujuan seorang yang berkuasa. Harus ada tokoh politik yang akan menjadi penguasa, atau aktor yang memegang kekuasaan, dan beberapa penggerak seperti alat atau sarana kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan politik.

Dalam masyarakat yang masih kental dan erat dengan budaya patriarki, perempuan seringkali dibatasi pergerakannya untuk melakukan kegiatan terlebih di ranah politik. Terdapat dinding yang tebal dan peran yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan yang menandakan bahwasanya masih adanya ketidakadilan gender pada zaman yang sudah dianggap modern. Dimana ketidakadilan ini menciptakan bahwasanya laki-laki lebih dikaitkan dengan kegiatan di luar rumah sedangkan perempuan memiliki peran dan kegiatan hanya di dalam rumah tangga. Hal tersebut melahirkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dari kesempatan, pendidikan, ataupun kegiatan yang berkaitan di ranah publik yang mana laki-laki selalu mendapatkan kesempatan dan juga peluang yang lebih besar dalam akses keterlibatan di berbagai kegiatan seperti organisasi sosial atau politik.

Dusun Kalisidi merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Dusun ini merupakan dusun yang berlatar belakang islami karena terdapat adanya pesantren tahfidzul quran yang tak lain merupakan menjadi sebuah panutan dan arah kiblat bagi kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Dusun Kalisidi sendiri memiliki kurang lebih 1200 warga yang seluruhnya menganut agama Islam. Karena masih lekat dengan tradisi agama, kegiatan keagamaan di Dusun Kalisidi sangatlah kental. Mulai dari dzibaan, pengajian, tahlilan, mengaji kitab kuning untuk warga perempuan dan juga ada kegiatan sewelasan yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin pengajian satu RW yang diadakan bergilir tiap RT dan dilaksanakan setiap tanggal 11 di bulan Islam.

Partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi masih terbilang memiliki kesenjangan. Padahal dalam segi kuantitas dan kualitas, perempuan di Dusun Kalisidi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan juga mampu berkompetitif. Secara empiris, perempuan di Dusun Kalisidi juga lebih mendominasi daripada laki-laki. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dalam ranah pendidikan,

perempuan di Dusun Kalisidi juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas perempuan di Dusun ini rata-rata berpendidikan tinggi dan juga ber-SDM mumpuni. Tetapi pada realitanya, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi ini masih tergolong rendah dan sedikit yang ikut andil atau bahkan kurang diikutkan dalam proses politik di Dusun Kalisidi.

Tabel 1. 1

Jumlah Penduduk Usia Produktif Dusun kalisidi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	RT	15-29			30-49			50-69			70-79			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	1	30	34	64	32	41	73	31	21	52	5	2	7	98	98	196
2	2	10	20	30	31	27	58	18	13	31	1	3	4	60	63	123
3	3	37	33	70	45	51	96	20	16	36	12	5	17	114	105	219
4	4	27	36	63	37	35	72	22	32	54	7	3	10	93	106	199
5	5	29	29	58	47	48	95	19	27	46	9	12	21	104	116	220
JML RW:		133	152	285	192	202	394	110	109	219	34	25	59	469	488	957

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

Didukung dengan data yang diperoleh dari Balai Desa Kalisidi, masyarakat perempuan yang berumur produktif di Dusun Kalisidi cenderung lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dengan umur produktif di Dusun Kalisidi mencapai angka 488 orang dan selisih sebanyak 19 orang dengan jumlah masyarakat laki-laki di Dusun Kalisidi. Tetapi, jumlah tersebut tidak bisa menjadi tolok ukur bagi perempuan di Dusun Kalisidi untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik. Meskipun jumlah perempuan di Dusun Kalisidi mendominasi, tetapi realitanya perempuan di Dusun Kalisidi masih jarang dilibatkan dalam proses dan juga kegiatan politik.

Tabel 1. 2**Penduduk Dusun Kalisidi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi**

NO	RT	DIPLOMA I/ II			D III/S. MUDA			DIPLOMA IV/ S 1			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	1	0	0	0	1	1	2	2	3	5	3	4	7
2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
3	3	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	4	5
4	4	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	3	4
5	5	0	0	0	1	0	1	2	1	3	3	1	4
JML													
RW: 6		0	2	2	4	3	7	5	8	13	9	13	22

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

Dalam studi kasus ini, partisipasi perempuan dalam kelembagaan maupun dalam Pendidikan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya budaya patriarki di dalam dusun yang juga di langgengkan oleh masyarakat desa. Tak hanya itu, partisipasi perempuan dalam ranah perpolitikan juga masih sangat minim. Terlihat di waktu Rapat Pokdarwis bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Semarang pada hari Jumat, 24 Juni 2022 yang membahas tentang desa wisata dan juga sosialisasi pemaksimalan tanah menggunakan pupuk organik tanpa zat kimia tersebut dihadiri kurang lebih 25 partisipan, yang mana 4 dari partisipan tersebut adalah perempuan yang terdiri dari 1 kepala dusun, 2 perwakilan anggota KKN dan 1 perwakilan masyarakat Dusun Kalisidi. Hal tersebut menjadi contoh bahwasanya partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi tergolong rendah. Tak hanya itu, pada rapat remaja dusun yang rutin diadakan setiap satu bulan satu kali, pada rapat tersebut juga masih rendah sekali perempuan yang ikut terlibat.

Pada historis dalam riwayat penjabatan kepala dusun yang mana Dusun Kalisidi dari dulunya belum pernah dipimpin oleh Kepala Dusun yang berjenis kelamin perempuan. Namun pada tahun 2020 kemarin, untuk pertama kalinya Dusun Kalisidi dipimpin oleh Kepala Dusun yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini pasti akan menjadi polemic bagi masyarakat Dusun Kalisidi yang mana realitanya sebenarnya adalah pergerakan perempuan dibatasi di dusun ini.

Dari kasus tersebut pasti akan berdampak pada partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi dalam budaya patriarki. Kurangnya support oleh masyarakat setempat akan menyebabkan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi menurun. Dalam penelitian ini, kasus ini akan menjadi objek penting yang nantinya peneliti akan menggali lebih dalam tentang bagaimana partisipasi politik perempuan dalam segi kebijakan di Dusun Kalisidi untuk berkontribusi di politik desa serta bagaimana dampak daripada relasi kuasa dan akses perempuan dalam berpartisipasi di Dusun Kalisidi.

Relasi kuasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara elite pemerintahan desa dengan pemimpin pondok pesantren yang ada di Dusun Kalisidi dalam kontribusi di berbagai kegiatan politik. Sebagaimana yang telah di sampaikan pada paragraf sebelumnya bahwa, Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang merupakan dusun yang seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam dan sangat kental dengan tradisi agama. Dengan adanya pondok pesantren di Dusun ini membuat masyarakat Dusun Kalisidi lebih berkiblat pada ajaran agama yang sudah ditanamkan.

Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai fokus penelitian, karena kasus ini sangat mungkin terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang. Berdasarkan pra observasi yang telah dilakukan peneliti pada proses pra penelitian. Menurut ketua organisasi keagamaan Muslimat NU ranting Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran barat, Kabupaten Semarang di rumahnya, bahwasanya terdapat

banyak sekali perempuan di Dusun Kalisidi yang berkualitas dalam segi pendidikan dan juga berkualitas dari segi keterampilan tetapi harus mengalah dan mengedepankan laki-laki untuk segala aspek, tak terkecuali di segi pengurusan Desa.

Seperti contoh yang baru-baru ini adalah terdapat pembentukan kelompok pembudidaya ikan di Dusun Kalisidi yang disebut “Pokdakan Sidodadi” yang mana pemimpin dari kelompok tersebut adalah laki-laki dan hanya melibatkan satu perempuan saja sebagai anggota dalam pembentukan kelompok tersebut. Selain itu, terdapat pula organisasi remaja dusun yang diberi nama “ARISKA” atau disebut dengan Asosiasi Remaja Dusun Kalisidi yang juga tidak melibatkan perempuan dalam struktur organisasi dan selama 5 tahun belakangan ini belum ada re-organisasi terhadap organisasi ARISKA. Perempuan hanya digunakan sebagai pelengkap saja dalam himpunan atau organisasi di Dusun Kalisidi. Hal inilah yang akan dijadikan sebagai point pembahasan dalam studi kasus ini. Gambaran khusus partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi dari segi kebijakan dan juga bagaimana relasi kuasa dan akses perempuan dalam politik di Dusun Kalisidi akan dijadikan focus kajian pada penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah disampaikan pada paragraph sebelumnya, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan seputar partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana partisipasi politik perempuan dalam ranah kebijakan di dusun tersebut dan bagaimana relasi kuasa serta akses perempuan di dusun tersebut dalam mempengaruhi partisipasi politik perempuan di politik desa. Sedangkan dibalik semua itu di era yang modern saat ini kesetaraan gender sedang di gaungkan untuk keadilan dan juga kemajuan sebuah peradaban. Maka dengan keunikan tersebut membuat peneliti sangat tertarik untuk meneliti problematikan politik-sosial dengan judul **“Partisipasi Politik Perempuan (Studi Tentang**

Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi. Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari alur pemikiran di atas dan supaya penelitian ini mengarah pada permasalahan yang dituju, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana partisipasi dan akses perempuan dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana relasi kuasa dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang partisipasi politik perempuan terhadap relasi kuasa dan akses perempuan dalam politik di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Maka terdapat tujuan di dalamnya yaitu :

1. Untuk mengetahui partisipasi politik perempuan dan akses perempuan dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui relasi kuasa dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja namun dapat menjadi sumber informasi bagi penulis lain yang mengambil judul yang sama, dan terdapat dua macam manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat umum untuk lebih sadar akan pentingnya kesadaran dalam maksud berpartisipasi politik tak terkecuali kaum laki-laki khususnya kaum perempuan supaya dapat terwujudnya negara yang lebih demokratis serta masyarakat yang lebih mampu terbuka dan berfikir modern dengan tidak adanya perbedaan terlebih di dalam gender.

2. Manfaat Praktis

Jika dilihat secara praktis penelitian ini memiliki manfaat bagi kaum perempuan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam ranah politik dan juga untuk menambah wawasan bagi seluruh masyarakat umum agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar masyarakat terlebih di dalam gender.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini maka tinjauan pustaka akan difokuskan menjadi 2 tema yakni tentang partisipasi politik perempuan dan relasi kuasa.

1. Partisipasi Politik Perempuan

Jurnal yang berjudul "*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Desa Tasik Agung Dalam Berpartisipasi Politik*" karya Hidayah & Munandar (2016) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di Desa Tasik Agung dalam berpartisipasi politik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa Partisipasi perempuan dalam politik di Desa Tasik, Kec. Rembang, Kab. Rembang masih dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan juga faktor ekonomi.

Dalam Skripsi Barus (2020) yang berjudul "*Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa*

Perpanden Kecamatan Kutalimbaru)” membahas mengenai partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru, karena tingkat partisipasi perempuan di Desa Perpanden masih tergolong rendah. Menggunakan metode kualitatif dengan Studi Kasus menunjukkan hasil bahwa faktor penghambat peran dan tingkat partisipasi perempuan di Kantor Desa Perpanden masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor budaya, faktor keluarga, faktor dari diri perempuan sendiri, faktor sosialisasi atau pengarahan, dan faktor peran lokal. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden guna kemajuan kaum perempuan Desa Perpanden.

Menurut Nurhalimah (2018) dengan jurnalnya yang berjudul *“Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa”* yang membahas tentang bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan *delegated power*, *placation* dan *consultation*. Yang di dominan pada kelompok besar *tokenism* yaitu suatu tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan di lihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran desa terhadap kesetaraan gender pada Desa Berakit tidak efektif dan efisien. Di katakana tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya di mana pada kuliner berbahan mangrove bahan yang

di gunakan susah untuk di cari .dan tidak efisien di karenakan dana yang di keluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang di dapatkan kembali (outcome).

Perkembangan literatur yang membahas fenomena tentang partisipasi politik perempuan setidaknya telah dijelaskan oleh (Yandy & Mustajab (2019) “*Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*” yang membahas bagaimana peran perempuan dalam kancah politik. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library Research* menunjukkan bahwasanya laki-laki yang tertarik dengan politik nasional menggunakan agama dan budaya sebagai alat doktrin dan untuk mendiskriminasikan perempuan, memberikan kesan bahwa perempuan sebatas pelengkap saja. Hal tersebut dapat mempengaruhi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik.

Menurut Talaohu (2021) “*Partisipasi Politik Kaum Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan*” membahas rendahnya partisipasi politik perempuan pada pemilu legislative di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2014. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi menunjukkan bahwasanya 66,66% perempuan di parlemen dapat merubah watak politik kita menjadi lebih humanis dan 70,00% perempuan perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama kaum perempuan. Selain itu, peran kaukus perempuan untuk parlemen dalam mempersatukan perempuan dan factor dukungan suami juga keluarga adalah salah satu yang berdampak.

Jurnal yang berjudul “*Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*” karya dari Priandi & Roisah (2019) . Menggunakan metode penelitian yuridis normative menunjukkan bahwa hingga sampai saat ini, partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum

mencapai target nasional yakni persen keterwakilan dari laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu, seperti memberikan Pendidikan politik agar hak-hak perempuan dapat diperjuangkan dan mempunyai kesempatan untuk berani tampil di ranah politik.

Menurut Widyaningrum (2020) "*Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis*". Menunjukkan bahwa partisipasi perempuan jauh dari angka yang seharusnya 30%. Padahal angka ini merupakan salah satu bentuk peningkatan partisipasi politik perempuan dan juga salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Jurnal yang berjudul "*Partisipasi Politik Perempuan dalam Kontruksi Sosial Budaya Media*" oleh Malihah (2011) membahas tentang bagaimana kontruksi sosial budaya peran gender dan bagaimana gambaran partisipasi politik perempuan di empat wilayah yang berada di Jawa Barat. System pemilihan umum, rekurtmen kader partai, keengganan perempuan untuk terlibat langsung keranah politik praktis, serta masih adanya presepsi masyarakat terhadap dunia poltiik menjadi factor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik langsung seperti menjadi kader, anggota parlemen, dan pembuat kebijakan. Selain itu adanya doktrin agama dan budaya patriarki membuat perempuan semakin tidak berdaya.

Penelitian Habibah (2015) dengan judul "*Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik*" menjelaskan bahwa sejauh mana partisipasi dan peran perempuan di dalam partai politik dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai politik. Dengan menggunakan metode wawancara menunjukkan bahwa factor Pendidikan yang merupakan factor signifikan terhadap partisipasi dan juga keaktifan sebagai pengurus partai politik adalah salah satu

factor yang mendorong perempuan untuk bergabung dengan partai politik. Pendidikan, pekerjaan, keadilan, kesetaraan gender, peran domestic, budaya patriarki, agama, dan hubungan keluarga adalah kendala yang harus dihadapi perempuan.

Menurut Kollo (2017) *“Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik”* yang membahas tentang pengaruh daripada budaya patriarki terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Menggunakan metode kajian Pustaka menunjukkan bahwasannya budaya patriarki sangat mempengaruhi kaum perempuan untuk berkiprah ke dunia politik Selain itu, ada beberapa hambatan lainya baik dari eksternal maupun internal.

2. Relasi Kuasa

Abhipraya, Khatami, & Iqbal (2021), Nastian & Nugroho (2022), dan Royandi & Satria (2018) memberi penjelasan mengenai relasi kuasa dalam penelitiannya.

Menurut Abhipraya, Khatami, & Iqbal (2021) *“Representasi Relasi Kuasa dalam Kelompok Masyarakat Pada Film Tilik”* menjelaskan representasi relasi kuasa atas informasi yang dimiliki oleh kelompok sosial berisi ibu-ibu dalam film pendek *“Tilik”*. Dengan menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa Bu Tejo sebagai actor utama menyebarkan relasi kuasanya secara informal dengan untuk memajukan kepentingannya yaitu tentang kemenangan suaminya sebagai calon lurah dan memojokan Dian yang dianggap sebagai pengalih perhatian dalam kelompok masyarakat.

Menurut Nastian & Nugroho (2022) *“Relasi Kuasa dan Suara:Politik Patron Klien pada Pilkada Lansung di Kabupaten Grobogan 2020”* mengkaji hubungan patron-klien yang terjalin antara kelas penguasa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan masyarakat yang mencoblos. Menggunakan metode studi kasus menunjukkan bahwa penerapan model patron-klien yang realistis menghasilkan proses politik traksaksional jangka Panjang selama

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Grobogan. Elite politik di daerah seperti tokoh masyarakat atau elite desa-lah yang menjembatani kekuasaan antara pemilih dengan yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

Menurut Royandi & Satria (2018) "*Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Pelabuhan Ratu*" membahas tentang actor dan relasi kekuasaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya laut di Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas dan hubungan patron-klien digunakan oleh semua actor untuk membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak, struktur dan relasi sosial. Sementara itu, kelompok nelayan ber-etnis Bugis berupaya menegosiasikan control terhadap akses sumber daya laut. Kelompok nelayan local, nelayan dari luar (nelayan banten), dan nelayan pendatang berusaha menjaga akses,

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada tema partisipasi perempuan dalam ranah politik untuk ikut serta berkontribusi di kegiatan politik. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti ajukan dengan peneliti terdahulu adalah penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang partisipasi politik perempuan yang berfokus pada indicator relasi kuasa dan akses perempuan dalam politik Desa. Terdapat perbedaan latar belakang budaya masyarakat dan juga perbedaan dalam tempat penelitian yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwasanya penulisan ini yang berjudul "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi Tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)" berbeda dengan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori kekuasaan sebagai landasan teori dalam skripsi ini karena teori tersebut berkaitan dengan kajian yang penulis teliti, yaitu tentang relasi kuasa dalam kekuasaan. Teori kekuasaan yang dimaksud adalah teori kekuasaan dari oleh Michel Foucault.

Menurut Foucault (1972), secara umum terdapat dua cara untuk mendefinisikan kekuasaan: dalam pengertian negative dan positif. Definisi negative menjelaskan bahwasanya kekuasaan tidak datang dari kesepakatan atau kekerasan. Definisi positif kekuasaan adalah keseluruhan struktur Tindakan. Bahwa melalui bujukan, rayuan, paksaan, larangan, menekan, untuk mendorong tindakan lain (Wandalibrata, 2019).

Ia percaya bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan berasal dari pengetahuan, dan pengetahuan berasal dari kekuasaan. Terhadap saling terhubung antara pengetahuan dan kekuasaan. Adanya hubungan timbal balik antara kekuasaan dengan pengetahuan yang mana kekuasaan sendiri diartikulasikan ke dalam pengetahuan dan juga sebaliknya. Kekuasaan sendiri digerakan dengan energi, kemampuan dan kehidupan masyarakat dimana pengetahuan lah yang menjadi landasannya.

Kemudian menurut Budiarjo (2010), kekuasaan adalah kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku orang lain, agar perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang berkuasa atau memiliki *power*. Orang tersebut bisa berupa individu atau bahkan kelompok dalam hal ini. Konsep kekuasaan Foucault sendiri tentang kekuasaan yang faktanya bahwa kekuasaan tersebut dijalinan daripada dimiliki. Dia tidak melekat ataupun terikat pada orang-orang melainkan menyatu atau berintegrasi dengan berbagai bentuk. Selanjutnya, kekuasaan beroperasi pada tingkatan mikro dan tidak selalu negative karena dapat menghasilkan kesenangan sekaligus makna.

Menurut Syafiuddin (2018), Foucault bertujuan untuk memposisikan wacana dan kekuasaan yang bermaksud untuk menyelidiki

bagaimana tubuh melakukan pengaturan diri dan pengendalian diri di bawah bimbingan ilmu atau pengetahuan dan sesuai juga disetujui kebenarannya. Pengetahuan yang melahirkan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik dengan kekuasaan yang menciptakan pengetahuan. Penyelenggara pengetahuan juga akan menghasilkan kekuasaan, dan penyelenggara kekuasaan akan terus menghasilkan pengetahuan.

Karena setiap kekuasaan tersebut distrukturkan dan di manifestasikan melalui sebuah pengetahuan dan wacana, maka konsep kekuasaan Foucault ini memiliki konsekuensi karena untuk memahami kekuasaan memerlukan penelitian terhadap produksi pengetahuan yang mendasari kekuasaan. Foucault juga berpendapat bahwasanya kebenaran dihasilkan karena setiap kekuasaan akan menghasilkan dan memproduksi dari kebenaran itu sendiri seperti bagaimana masyarakat akan digiring untuk menaati kebenaran yang telah ditentukan atau disepakati.

Menurut Foucault (2002), konsep kekuasaan adalah suatu dimensi dan juga relasi, dimana relasi dan kekuasaan mempunyai keterikatan yang dekat. Relasi kuasa selalu dilekatkan oleh setiap proses politik. Relasi kuasa sendiri merupakan buah dari proses politik. Kekuasaan sendiri bukanlah dimiliki atau milik seorang actor tapi merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan yang ditargetkan. Selain itu kekuasaan juga berkaitan dengan strategi dan juga praktek dalam sebuah ruang lingkup yang mana terdapat adanya beberapa posisi yang secara tidak lain berkaitan satu sama lain.

Konsep kekuasaan ini berdampak signifikan terhadap pusat-pusat dan aspek kekuasaan serta merupakan sebuah bentuk perjuangan untuk membatasinya karena relasi kekuasaan ada dalam setiap aspek kehidupan. Foucault sendiri melihat kekuasaan tidak hanya mencangkup negara dan kelas elite, namun berkemungkinan juga untuk membahas lebih rinci semua dominasi dan relasi kekuasaan, termasuk kekuasaan dalam pengetahuan, akademis, birokrat, dan juga rakyat jelata yang perlu dibina.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan dalam kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah memungkinkan sebuah kekuasaan yang menciptakan pengetahuan dan pengetahuan yang menciptakan kekuasaan dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta dengan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Tailor dikutip oleh Moleong menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang memperoleh dokumen tertulis dari data deskriptif pada bentuk tertulis dan lisan (J. Moleong, 2002).

Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan jenis penelitian yang mempelajari atau menyelidiki segala bentuk suatu fenomena atau kejadian mengenai individu atau Lembaga tertentu (Bimo, 2010).

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan lapangan yang turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data melalui observasi, wawancara, dan pengamatan langsung.

Adapun tujuan penulis dalam hal ini untuk mempermudah penulis dalam pengambilan data di lapangan yang nantinya akan mendapatkan hasil data-data yang maksimal untuk diterapkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung melalui informan maupun dari tempat yang diteliti. Data primer didapat melalui kegiatan wawancara dengan subjek

penelitian atau pengamatan langsung dilapangan (Sugiyono, 2015).

Data primer sebagai data pokok yang harus dicari di lapangan, pada data primer ini peneliti dapat memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Pada penelitian partisipasi politik perempuan studi tentang relasi kuasa dan akses perempuan dalam politik dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara atau bertanya langsung pada masyarakat yang hendak dijadikan sebagai informan. Peneliti mengambil enam informan dari masyarakat Dusun Kalisidi yang beberapa ada sebagai *elite* desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data tersebut digunakan untuk mendukung apa yang dipelajari dari sumber lain seperti buku, jurnal dan bahan penelitian lainnya (J. Moleong, 2002).

Data sekunder berasal dari data tulisan berupa arsip (dokumen), buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi (baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan). Adapun data sekunder pada penelitian ini , peneliti akan memperoleh data yang berasal dari arsip maupun data yang berasal dari pemerintahan desa setempat, yang data-datanya berhubungan dengan fokus pada penelitian ini yakni termasuk data profil dari dusun kalisidi yang nantinya dapat memenuhi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan sumber kedua ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memberikan keterangan serta pemahaman dan juga dapat menguatkan data primer pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai pada pengkajian untuk mendapat data dalam menguraikan dan menggambarkan secara mendalam. Disini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi Partisipan

Observasi merupakan kegiatan guna mengumpulkan serta menerangkan hasil dari olah data yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991).

Dalam observasi ini melibatkan beberapa hal diantaranya yakni lokasi tempat penelitian berlangsung, pelaku peran yang dijadikan informan dan aktivitas pelaku peran (informan) yang terlibat dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti melihat dan mengamati apa yang ditemukan di lapangan diantaranya pengamatan terhadap proses partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yakni sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kehidupan informan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan informan guna untuk bertukar pikiran dan ide mengenai fenomena yang telah diteliti sehingga peneliti dapat mengaitkan makna kedalam suatu topik pada penelitian yang telah diteliti (Sugiyono, 2015).

Setelah informan memenuhi ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah perekrutan informan. Proses rekrutmen informan penulis mencari data melalui kepala dusun dan juga tokoh masyarakat yang direkomendasikan untuk memenuhi penulis dalam pencarian data secara wawancara kepada warga dusun yang terlibat secara langsung untuk mencari data-data tentang informan

sehingga peneliti dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

Penulis akan mewawancarai informan yang nantinya akan membantu menggali lebih dalam tentang partisipasi politik perempuan studi kasus tentang relasi kuasa dan akses perempuan dalam politik di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan proses *face to face* dan tanya jawab atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Peneliti akan mengambil enam informan dari masyarakat Dusun Kalisidi yang akan dikategorikan menjadi tiga kategori yakni : elite desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa.

Tabel 1. 3

Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA	STATUS	KATEGORI
1	Fles Wan Tantri	Kepala Dusun	Elite Desa
2	Abdullah Suyuti, S.Ag.	Ketua BPD	Elite Desa
3	Mustaanah, S.Pd.I	Guru MI	Elite Desa
4	Deswi Puji, S.Pd.I	Kepala RA	Tokoh Masyarakat
5	Abdul Ghofar	Pemuka Agama	Tokoh Masyarakat
6	Kharisatul Mammuniyah, S.Pd.I	Guru MTs	Masyarakat Biasa

NO	NAMA	STATUS	KATEGORI
7	Rikza Ahmad Aby Aufa, S.T	Anggota POKDAKAN SIDODADI	Masyarakat Biasa
8	Zidatul Ulya, S.H	Anggota Karang Taruna	Masyarakat Biasa
9	Muhammad Alvin Alexandra	Mahasiswa/Anggota Karang Taruna	Masyarakat Biasa
10	Gilang Saputra Hermawan	Pelajar/Anggota Karang Taruna	Masyarakat Biasa

Sumber: data penelitian Erina Milata El-Hasna tahun 2022

Hasil dari wawancara terhadap enam informan tersebut akan menjadi point penting yakni terkait tentang partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi. Data yang diperoleh dari wawancara nantinya akan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan keadaan maupun kondisi dari informan.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002) dokumentasi merupakan cara atau metode dalam mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, agenda dan sebagainya. Dokumentasi juga dapat diartikan cara pemilihan dari beberapa kejadian yang sudah berlalu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang telah di peroleh dari hasil observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi secara sistematis dengan cara memilih masa yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari kemudian

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015).

Peneliti memakai teknik analisis data induktif. Analisis data induktif adalah pendekatan analisis untuk menemukan hasil dengan cara pikir yang khusus. Analisis dimulai dengan fakta, dan kemudian menggunakan deduksi teoretis untuk menjelaskannya. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis apa yang terjadi di lapangan, menarik kesimpulan, mencari makna dan hasilnya akan menjadi hasil penelitian (Muhadjir, 1996).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumen untuk menarik kesimpulan umum. Metode penilaian fakta eksperimental dengan mengevaluasi teori-teori yang sudah ada yang jelas efektif. Miles & Huberman (2005) menunjukkan tiga tahap dalam analisis data antara lain adalah :

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data yang dimulai dengan membuat ringkasan lalu dipilah-pilah hal yang pokok lalu yang mendasarkan terhadap yang penting. Reduksi data adalah sebuah bentuk analisa yang menajamkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari sekumpulan informan yang telah disusun kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga dapat dikategorikan pada permasalahan guna memudahkan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian yang akan diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna serta kebenaran yang disepakati oleh subjek tempat peneliti itu dilaksanakan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rencana penelitian dari penulis yang telah ditulis secara naratif. Sistematika penelitian memuat rangkaian dan struktur dari setiap bab dan sub-sub bab dari laporan penelitian yang menunjukkan hubungan sistematis dan logis. Berikut adalah sistematika penelitian yang akan penulis laporkan untuk pembuatan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TEORI RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT

Berisi tentang penjelasan dan beberapa uraian landasan teori tentang relasi kuasa menurut Michel Foucault yang membahas bagaimana kekuasaan yang memunculkan sebuah pengetahuan yang mana tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak melibatkan relasi kuasa. Filsuf dan juga pelopor daripada konsep strukturalisme ini berhasil memaparkan secara baik bahwasanya kehadiran dari kekuasaan tersebar dimana-mana karena kekuasaan adalah salah satu dimensi daripada satu relasi yang terpadu. Singkatnya, dimana ada sebuah relasi, maka ada sebuah kekuasaan didalamnya.

BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KABUPATEN SEMARANG DAN GAMBARAN KHUSUS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG

Bagian ini menguraikan terkait gambaran lokasi penelitian Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang. Terkait letak penelitian dari

geografi Dusun Kalisidi, Topografi Dusun Kalisidi, dan demografi Dusun Kalisidi. Profil Dusun Kalisidi, sejarah Dusun Kalisidi dan juga visi misi Dusun Kalisidi. Menguraikan beberapa penemuan dan diskusi yang focus pada hasil dan implikasi dari studi awal yakni berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi.

BAB IV PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN AKSES PEREMPUAN DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KABUPATEN SEMARANG

Analisis masalah pertama yang berkaitan dengan gambaran mengenai partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang

BAB V ANALISIS RELASI KUASA DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG

Analisis masalah ke-dua yang berkaitan dengan bagaimana gambaran mengenai relasi kuasa dan akses perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisid, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya terdapat kesimpulan, saran, dan daftar Pustaka yang berada di bagian paling akhir.

BAB II

TEORI PARTISIPASI DAN RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT

A. Partisipasi Politik dalam Pandangan Michel Foucault

Michel Foucault memiliki beberapa pandangannya tentang bagaimana melihat politik itu bekerja. Salah satu pandangannya mengenai partisipasi politik. Menurut Foucault (2007), partisipasi politik tidak hanya terjadi dalam konteks institusi formal seperti pemerintah atau pemilihan umum, tetapi juga dapat terjadi di sekitar praktik-praktik sehari-hari yang membentuk kenormalan sosial.

Foucault menganggap bahwa setiap masyarakat memiliki aturan dan norma yang berlaku sebagai syarat dalam interaksi sosial. Aturan tersebut membentuk relasi kekuasaan yang merupakan pilar dalam struktur sosial. Partisipasi politik, dalam teori Foucault, timbul ketika ada suatu pemahaman kritis terhadap relasi kekuasaan yang sudah ada dan dilakukan aksi untuk mengubah atau menentangnya.

Dalam pandangan Foucault (1990), partisipasi politik juga terkait dengan pembentukan identitas politik di dalam masyarakat. Sebagai contoh, cara orang mendefinisikan diri dalam kelompok tertentu dapat menjadi cara partisipasi politik. Misalnya, ketika kelompok minoritas mengorganisir diri dan mengampanyekan hak mereka terhadap diskriminasi, mereka membentuk solidaritas dan identitas politik sehingga mempengaruhi kekuasaan yang ada.

Secara keseluruhan, dalam pandangan Foucault, partisipasi politik bukanlah sesuatu yang terbatas pada interaksi-institusi politik yang berlaku dalam institusi formal seperti pemilihan umum. Partisipasi politik juga mencakup realitas norma-norma sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat dan dapat didorong oleh perubahan opini dan solidaritas dari kelompok-kelompok sosial yang tidak terwakili.

B. Relasi Kuasa dalam Pengetahuan

Teori kekuasaan yang diusung oleh Foucault ini berbeda dengan yang biasa diperbincangkan. Foucault lebih melihat bahwasanya kekuasaan bukan dimiliki oleh aktor maupun pemegang kekuasaan, melainkan merupakan suatu strategi untuk mencapai ataupun mewujudkan tujuan yang sedang ditargetkan.

Jauh sebelum Foucault berbicara secara eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karyanya awalnya adalah pada sejarah pengetahuan, seperti dalam karyanya yang berjudul *Archeology Of Knowledge*. Namun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, seperti konsep -konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimate dalam menerangkan segala sesuatu. Dalam karya awalnya, *The Archeology of Knowledge* (1972), struktur pengetahuan tersebut dikenal sebagai suatu formasi wacana.

Ia percaya bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan melahirkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan melahirkan sebuah kekuasaan. Terhadap saling terhubung antara pengetahuan dan kekuasaan. Adanya hubungan timbal balik antara kekuasaan dengan pengetahuan yang mana kekuasaan sendiri diartikulasikan ke dalam pengetahuan dan juga sebaliknya. Kekuasaan sendiri digerakan dengan energi, kemampuan dan kehidupan masyarakat dimana pengetahuan lah yang menjadi landasanya.

Karena setiap kekuasaan tersebut distrukturkan dan di manifestasikan melalui sebuah pengetahuan dan wacana, maka konsep kekuasaan Foucault ini memiliki konsekuensi karena untuk memahami kekuasaan memerlukan penelitian terhadap produksi pengetahuan yang

mendasari kekuasaan. Foucault juga berpendapat bahwasanya kebenaran dihasilkan karena setiap kekuasaan akan menghasilkan dan memproduksi dari kebenaran itu sendiri seperti bagaimana masyarakat akan digiring untuk menaati kebenaran yang telah ditentukan atau disepakati (Foucault, 2002).

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Isu Relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah dimiliki tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia sesama maupun dengan lembaga

Namun dalam hal ini Foucault dari keseluruhan karya yang dituliskannya, tidak terlalu menjelaskan secara eksplisit mengenai relasi kuasa dan pengetahuan. Dalam karya buku yang ditulis dengan judul *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (2002) baru mulai menjelaskan tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Akan tetapi Foucault baik dalam tulisan, diskursus kelas kuliah dan wawancaranya, tidak membicarakan secara menyeluruh antara relasi kuasa dan pengetahuan. Hal ini pada akhirnya mempersulit untuk mempelajari relasi kuasa dalam pengetahuan untuk lebih jauh lagi.

Pembahasan relasi kuasa dan pengetahuan akan bertolak dari pemahaman Foucault sendiri tentang bagaimana kekuasaan yang sering didengar. Konsep yang diusung oleh Foucault tentang kekuasaan sangatlah berbeda. Karena ia tidak mengarah pada kecenderungan bahwasanya

kekuasaan adalah percaturan politik, kursi jabatan atau hak-hak istimewa yang dimiliki suatu kelompok kecil atau tindakan represif, otoriter dan koersif yang dilakukan oleh elite politik, melainkan kekuasaan dimaknai secara positif dan produktif.

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Ide Foucault tentang kekuasaan memiliki banyak versi dan juga sudut pandang dari berbagai macam kepentingan. Sebagian pemikir meletakkan ide kekuasaan Foucault bekerja sebagai pemerintahan dan peran-perannya, sebagai kelas sosial yang berkuasa, sebagai tata laksana kapitalisme atau sebagai lembaga biasa yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari.

Sedangkan pengetahuan dalam pandangan Foucault, dari masa ke masa bukanlah suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai episteme. Episteme merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman (Afandi, 2011)

Struktur pengetahuan yang otoritatif dan legitimate ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim. Dengan demikian menurut Foucault, ada dua pendapat penting saat pengetahuan bertemu dengan pikiran-pikiran tentang kemanusiaan. Pertama, dengan pengetahuannya sendiri manusia merupakan makhluk yang dibatasi oleh lingkungan sekitarnya. Kedua, rasionalitas dan kebenaran selalu berubah sepanjang sejarah.

Menurut Foucault (2002), konsep kekuasaan adalah suatu dimensi dan juga relasi, dimana relasi dan kekuasaan mempunyai keterikatan yang

dekat. Relasi kuasa selalu dilekatkan oleh setiap proses politik. Relasi kuasa sendiri merupakan buah dari proses politik. Kekuasaan sendiri bukanlah dimiliki atau milik seorang aktor tapi merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan yang ditargetkan. Selain itu kekuasaan juga berkaitan dengan strategi dan juga praktek dalam sebuah ruang lingkup yang mana terdapat adanya beberapa posisi yang secara tidak lain berkaitan satu sama lain.

Kekuasaan semestinya dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan/mempererat relasi kekuatan itu, yang membentuk suatu rantai-rantai atau semacam sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah dampak ataupun buah dari pada itu. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan kursi, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (omnipresent), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial (Foucault, 1972).

Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategi (Kamahi, 2017).

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara ataupun sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan terletak di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.

Kekuasaan itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari

kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.

Dalam karyanya yang berjudul *The Order of Things, Archeology of Human Sciences*, Foucault (2007) menunjukkan bahwa ada dua perubahan besar yang terjadi dalam bentuk umum pemikiran dan teorinya. Yang pertama terjadi pada pertengahan abad 17, yang kedua pada awal abad 19. Setelah menganalisis diskursus ilmu pengetahuan abad 17 dan 18 seputar sejarah alam, teori uang dan nilai dan tata bahasa, Foucault mengambil kesimpulan bahwa pusat ilmu pengetahuan pada waktu ini adalah tabel. Orang hendak merepresentasikan realitas dalam tabel. Tabel adalah satu sistem tanda, satu bentuk taksonomi umum dan sistematis dari benda-benda. Dengan konsentrasi pada tabel, pengetahuan pada masa ini menjadi “ahistoris”.

Pada akhir abad 18 (setelah revolusi Prancis) sampai pertengahan abad 20 (Perang Dunia II), konsentrasi wacana ilmiah pada masa ini adalah sejarah dan manusia sebagai subjeknya. Manusia dibebaskan dari segala alienasi dan bebas dari determinasi dari segala sesuatu. Manusia menjadi objek pengetahuan dan dengan demikian dia menjadi subjek dari kebebasan dan eksistensinya sendiri. Manusia menjadi pusat pemikiran. Hal ini terlihat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Di sini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk

berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.

Kekuasaan, menurut Foucault (1997), tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme yang mendominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Karena kekuasaan tidak datang dari luar melainkan menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa hubungan keluarga yang menormalkan bahwa suami adalah yang harus bekerja untuk mencari nafkah sementara istri hanya bertugas mengurus rumah tangga serta merawat anak-anaknya.

Konsep Foucault ini membawa konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu, yang menimbulkan efek kuasa. Namun Foucault berpendapat bahwa kebenaran di sini bukan sebagai hal yang turun dari langit, dan bukan juga sebagai sebuah konsep yang abstrak. Kebenaran di sini diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut (Syafiuddin, 2018).

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi

kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

Dalam bukunya yang berjudul *The History of Sexuality* (1990) Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:

a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.

c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.

d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

e. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada

pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan.

Bagi Foucault (2002) dalam bukunya yang berjudul *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* merupakan suatu kekuatan di dalam ilmu pengetahuan yang diperoleh setiap individu. Kekuasaan di sini diartikan sebagai pemimpin dalam bidang keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kekuasaan memiliki sifat yang sangat luas sama dengan lembaga sosial. Sehingga dapat diartikan tidak ada ruang yang bersifat bebas setiap celah-celah jaringan. Relasi-relasi dari kekuasaan ini sebenarnya saling terhubung satu sama lain, seperti kekerabatan dan keluarga,

Kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yaitu adanya pengaruh perubahan besar pada pelaksanaan kekuasaan melahirkan objek pengetahuan yang baru. Tanpa pengetahuan kekuasaan tidak mungkin dijalankan, dan pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan.

Di dalam *Power Knowledge* memusatkan perhatian kekuasaannya terhadap diri (individu) dan orang lain, melalui produksi kekuasaan. Di dalam pengetahuan tersebut, semua orang bisa menguasai segala hal baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat. Akan tetapi, kekuasaan terhadap ilmu pengetahuan ini juga mampu mengatur diri kita sendiri. Apabila orang itu berilmu, maka dia akan mengetahui apa saja yang merupakan

kekuarangan dari mereka, tidak hanya di situ saja, namun dia juga mengatur orang lain (Foucault, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih teori relasi kuasa Michel Foucault karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut bisa memperjelas fenomena dengan realitas yang dikaji oleh peneliti. Peneliti akan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap relasi kuasa antara Aktor politik Dusun Kalisidi dengan tokoh masyarakat dalam kebijakan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Menurut Michel Foucault kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan atas relasi kekuasaan yang terjadi tanpa adanya pengetahuan kekuasaan tidak mungkin dijalankan dan pengetahuan dibentuk dalam produk yang digunakan untuk melaksanakan relasi kekuasaan

BAB III
GAMBARAN UMUM DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI, KABUPATEN
SEMARANG DAN GAMBARAN KHUSUS PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISID, KECAMATAN
UNGERAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG

A. Profil Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

1. Letak Geografis Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi. Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Dusun Kalisidi merupakan sebuah dusun yang berada di wilayah Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Kalisidi sendiri memiliki 9 dusun diantaranya yakni Dusun Manikmoyo, Mrunten Kulon, Mrunten Wetan, Compok, Gebug, Pilahan, Bender Dukuh, Bender Desa, dan Dusun Kalisidi. Dusun ini terletak di perbukitan gunung Ungaran. Dusun Kalisidi sendiri memiliki luas sebesar kurang lebih 204 Ha. Karena daerahnya termasuk dataran tinggi, sebagian tanahnya didominasi oleh tanah perkebunan, cengkeh, kopi, dan persawahan. Dilihat dari segi lokasi, Dusun Kalisidi ini memiliki letak di koordinat garis lintang 7,1252 dan garis bujur 110,3679. Dusun Kalisidi dapat ditempuh menggunakan motor dan mobil dengan jarak tempuh 21 KM dari pusat Kota Semarang dan 3 KM dari pusat Kabupaten Semarang.

Adapun secara jelas batas Wilayah Dusun Kalisidi sebagai berikut:

Sebelah Timur: Dusun Bender Desa

Sebelah Barat: Dusun Compok

Sebelah Selatan: Dusun Bender Dukuh

Sebelah Utara: Airr Terjun Curug Lawe

Dusun Kalisidi sendiri memiliki beberapa potensi wisata alam seperti, Curug Lawe Benowo Kalisidi, Wisata Air Jeguran Mbendungan, Wisata Edukasi Kelompok Wanita Tani, Kandang Ternak Komunal, Griya Dahar Sinongo milik Bumdes Kayaguna, Embung Situgilas, Lapangan Gelora Bumi Kalisidi (GBK), Jalur Hiking area perkebunana Zanzibar, Area Perkemahan, dan Pengolahan Kopi khas Kalisidi (KOBUKA). Tetapi, wisata unggulan dan yang lebih terkenal di khalayak masyarakat adalah Curug Lawe Benowo Kalisidi. Dusun Kalisidi juga merupakan satu-satunya akses terakhir untuk menuju ke Wisata Alam curug tersebut.

Dusun ini merupakan dusun yang berlatar belakang islami karena terdapat adanya pesantren salaf tahfidzul quran Al-Uqola' yang tak lain merupakan menjadi sebuah panutan dan arah kiblat bagi kegiatan keagamaan di dusun tersebut. Dusun Kalisidi sendiri memiliki kurang lebih 1200 warga yang seluruhnya menganut agama Islam. Karena masih lekat dengan tradisi agama, kegiatan keagamaan di Dusun Kalisidi sangatlah kental. Mulai dari dzibaan, pengajian, tahlilan, mengaji kitab kuning untuk warga perempuan dan juga ada kegiatan sewelasan yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin pengajian satu RW yang diadakan bergilir tiap RT dan dilaksanakan setiap tanggal 11 di bulan Islam.

2. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

a. Kependudukan

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Desa Kalisidi terdapat banyak berdiri rumah, gedung-gedung lembaga pendidikan, tempat peribadatan, pekarangan dan lain-lain. Mengenai iklim, Dusun Kalisidi beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Namun karena Dusun Kalisidi terletak di perbukitan Gunung Ungaran, Dusun Kalisidi jarang sekali dilanda oleh musin kemarau. Keadaan Demografis Dusun Kalisidi menurut data per April 2022, bahwa jumlah penduduk Dusun Kalisidi berjumlah 1.267 jiwa terdiri dari 408 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk laki-laknya 613 jiwa dan perempuan 654 jiwa. Terlihat dari jumlah tersebut, jumlah perempuan di Dusun Kalisidi lebih mendominasi daripada jumlah laki-laki. Sumber utama data penduduk adalah sensus diadakan setiap sepuluh tahun. Sensus adalah menghitung semua penduduk yang tinggal di Indonesia termasuk warga negara Orang asing kecuali anggota misi diplomatik negara sahabat dan keluarganya. Adapun rincian jumlah masyarakat Dusun Kalisidi sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Jumlah Masyarakat Dusun Kalisidi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	613 Orang
2	Perempuan	654 Orang
3	Jumlah	1.267 Orang

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Kalisidi cukup mumpuni, karena terdapat sekolah formal dan nonformal yang kegiatannya masih sangat aktif diadakan di Dusun Kalisidi. Terdapat beberapa fasilitas untuk menunjang pendidikan masyarakat Dusun Kalisidi seperti Kelompok Belajar (KB), Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan juga terdapat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Uqola'. Selain itu, masyarakat Dusun Kalisidi memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Adapun rincian mata pencaharian masyarakat Dusun Kalisidi sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Kalisidi

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	132	154	286
2	Belum Tamat SD/Sederajat	56	77	133
3	Tamat SD/Sederajat	186	195	381

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
4	SLTP/Sederajat	145	148	293
5	SLTA/Sederajat	69	83	152
6	Diploma I/II	2	2	4
7	Diploma III/ Sarjana Muda	4	3	7
8	Diploma IV/Strata I	5	8	13
9	Strata II	-	-	-
10	Jumlah			1267

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

c. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Dusun Kalisidi sangat bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai petani, wirasuasta, karyawan swasta, pegawai negeri dan buruh. Mata Pencaharian penduduk Dusun Kalisidi dalam sebagian besar masih didalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Penduduk yang tinggal didaerah pedesaan biasanya dengan mata pencaharian tersebut disebabkan karena sumber daya alam yang melimpah yang membuat mereka memiliki beragam mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Dusun Kalisidi memilih mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan jumlah terbanyak yakni 254 orang. Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai wirausaha, karyawan swasta, petani/pekebun. Adapun rincian

mata pencaharian masyarakat Dusun Kalisidi sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Daftar Pekerjaan Warga Dusun Kalisidi

NO	MATA PENCAHARIAN	L	P	JUMLAH
1	Pelajar/Mahasiswa	97	135	232
2	Pensiunan	1	-	1
3	Pegawai Negeri Sipil	1	2	3
4	Perdagangan	-	2	3
5	Petani/Pekebun	48	17	65
6	Karyawan Swasta	110	144	254
7	Karyawan Swasta	1	-	1
8	Karyawan Bumh	1	-	1
9	Karyawan Bumd	1	1	2
10	Karyawan Honorer	43	73	116
11	Buruh Harian Lepas	-	1	1
12	Buruh Peternakan	-	1	1
13	Pembantu Rumah Tangga	-	2	2
14	Guru	101	103	204
15	Jumlah	403	481	884

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

d. Sosial Budaya

Keadaan sosial masyarakat Dusun Kalisidi memiliki hubungan dan kerukunan yang baik yang tercipta antara satu sama lain sebagai cerminan dalam kehidupan sosial. Karena masih bernuansa desa, masyarakat Dusun Kalisidi masih lekat dengan tradisi gotong royong dan menolong antar sesama yang mana hal tersebut adalah suatu ciri khas bagi masyarakat yang hidup di pedesaan.

Dalam melakukan suatu acara seperti perkawinan, khitanan, takziah, dan lain sebagainya masyarakat Dusun Kalisidi selalu bahu membahu menolong baik secara materi maupun non materi untuk melancarkan acara yang sedang berlangsung tersebut tanpa rasa pamrih. Remaja Dusun Kalisidi juga terbilang juga memiliki karakter yang aktif dan ringan tangan apabila di mintai pertolongan oleh siapapun. Sebagaimana masyarakat di pedesaan pada umumnya, masyarakat Dusun Kalisidi juga memiliki karakter yang ramah dalam bersosial dengan yang lainnya.

Dusun Kalisidi sendiri memiliki beberapa budaya yang secara rutin diadakan di Dusun Kalisidi, seperti acara *sewelasan*, iribaan (stradisi syukuran perairan), dan Akhirussanah. Acara *sewelasan* sendiri merupakan sebuah acara pengajian rutin yang diadakan bergilir di setiap RT yang mengundang seluruh masyarakat Dusun Kalisidi dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya' setiap tanggal 11 pada bulan Islam. Rangkaian pada acara *sewelasan* sendiri diawali

dengan pembukaan, sambutan ketua RT, Ketua Dusun, serta tokoh masyarakat, kemudian diiringi rebana, lalu Maudloh Hasanah yang biasanya di sampaikan oleh tokoh agama setempat, lalu ditutup dengan doa dan iringan sholawat berasal dari grup rebana Remaja Dusun Kalisidi sendiri. Acara tersebut biasanya selesai sampai jam 23.00 WIB. Selain untuk menambah keimanan dan ketaqwaan masyarakat Dusun Kalisidi, acara *sewelasan* juga untuk mempertemukan seluruh lapisan masyarakat Dusun Kalisidi agar lebih mengenal satu sama lain.

Kemudian ada acara iribaan, sendiri merupakan sebuah tradisi dimana acara tersebut berupa selamatan atau syukuran perairan. Acara tersebut rutin dilakukan oleh masyarakat Dusun Kalisidi setiap 3 bulan sekali. Biasanya acara tersebut dimulai dengan doa bersama yang kemudian di tutup dengan makan bersama di sepanjang alur perairan yang menyambung di setiap RT di Dusun Kalisidi.

Acara Akhirusannah adalah kegiatan rutin setiap tahun yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al'Uqola' yang melibatkan seluruh masyarakat yang berada di Dusun kalisidi. Acara tersebut biasanya dimulai di pagi hari hingga malam hari. Di pagi hari kegiatan tersebut dibuka dengan pawai atau karnaval keliling dusun, kemudian setelahnya ada lomba-lomba yang bisa diikuti oleh anak-anak Dusun Kalisidi. Kemudian pada malam hari, acara tersebut ditutup dengan pengajian.

e. Politik

Keadaan politik masyarakat Dusun Kalisidi sendiri berdasarkan data sampel pemilu tahun 2019 terdapat sebanyak 883 penduduk yang tercatat memiliki hak suara dalam pemilihan umum kepala desa, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 905 warga. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 905 warga. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Dusun Kalisidi memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dalam kategori pemilu. Adapun rincian data tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Daftar Pemilih yang Memiliki Hak Suara

NO	JENIS KELAMIN	Tempat Pemungutan Suara		Jumlah Keseluruhan
		06	07	
1	Laki-Laki	208	214	422
2	Perempuan	231	230	461
3	Jumlah	439	444	883

Sumber : Data Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

B. Partisipasi Politik Perempuan Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Dalam proses politik, partisipasi merupakan suatu hal yang sangat vital karena dengan ikut serta berpartisipasi di kegiatan politik akan menyadarkan beberapa hal yang penting dan dapat menandakan bahwa masyarakat tidak begitu apatis dengan kegiatan politik yang sedang

maupun akan berjalan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana para pemegang kekuasaan bertindak serta mengeluarkan kebijakan.

Masyarakat yang masih kental akan budaya patriarki mengakibatkan perempuan seringkali dibatasi pergerakannya untuk melakukan kegiatan terlebih di ranah politik. Terdapat dinding yang tebal dan peran yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan yang menandakan bahwasanya masih adanya ketidakadilan gender pada zaman yang sudah dianggap modern. Dimana ketidakadilan ini menciptakan bahwasanya laki-laki lebih dikaitkan dengan kegiatan di luar rumah sedangkan perempuan memiliki peran dan kegiatan hanya di dalam rumah tangga. Hal tersebut melahirkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dari kesempatan, pendidikan, ataupun kegiatan yang berkaitan di ranah publik yang mana laki-laki selalu mendapatkan kesempatan dan juga peluang yang lebih besar dalam akses keterlibatan di berbagai kegiatan seperti organisasi sosial atau politik.

Partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi masih terbelang memiliki kesenjangan. Padahal dalam segi kuantitas dan kualitas, perempuan di Dusun Kalisidi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan juga mampu berkompetitif. Secara empiris, perempuan di Dusun Kalisidi juga lebih mendominasi daripada laki-laki. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dalam ranah pendidikan, perempuan di Dusun Kalisidi juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas perempuan di Dusun ini rata-rata berpendidikan tinggi dan juga ber-SDM mumpuni. Tetapi pada realitanya, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi ini masih tergolong rendah dan sedikit yang ikut andil atau bahkan kurang diikutkan dalam proses politik di Dusun Kalisidi.

Budaya patriarki sendiri merupakan pola dalam suatu sistem hubungan sosial yang di dalamnya memprioritaskan laki-laki. Hal tersebut

menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan peran yang juga disebabkan oleh persepsi jika laki-laki lebih berkuasa atas perempuan karena perempuan sering kali dianggap makhluk yang memiliki kelemahan. Karena sebagian besar masyarakat Dusun Kalisidi menganggap bahwa politik merupakan aktivitas yang maskulin. Perempuan dinilai sebagai pribadi yang pasrah, penurut, lemah lembut dan lebih cocok untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut menjadikan perempuan di Dusun Kalisidi dianggap tidak cocok untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik terlebih dalam partisipasi politik.

Menurut Hariyanti (2018), perempuan dalam politik tidak bisa lepas dengan image konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Padahal bagi perempuan, politik tidak hanya seputar parlemen dan pemerintahan saja melainkan terdapat banyak aspek yang meliputinya diantaranya seperti pemberdayaan ekonomi dan keluarga. Perempuan dan laki-laki sebenarnya memiliki kenutuhan politik yang sama, yang harus diperjuangkan. Karena dalam keterlibatan perempuan Dusun Kalisidi di partisipasi politik cukup rendah, hal tersebut akan mengakibatkan kebijakan politik ataupun keputusan yang mengenai kebijakan umum dapat mempengaruhi perempuan. Sebagian besar masyarakat Dusun Kalisidi menganggap bahwa politik tidak cocok untuk dilakukan oleh kaum perempuan.

Hal ini terjadi karena faktor masyarakat yang memiliki pendirian teguh pada nilai-nilai islami. Membuat perempuan sedikit dibatasi dalam hal-hal yang berbau politik. Masyarakat Dusun Kalisidi berpegang teguh dengan ajaran Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi "*Arrijalu Qowwamuna A'lannisa*" yang memiliki arti bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sehingga hal tersebut membuat perempuan menjadi harus memprioritaskan laki-laki di setiap aspek kegiatan dan bahkan jarang dilibatkan dalam setiap proses politik yang berlangsung.

Pondok pesantren di Dusun Kalisidi juga memiliki pengaruh yang penting dalam masyarakat Dusun karena dalam ajaran yang diajarkan masih menganggap bahwa perempuan seharusnya tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah, harus melakukan pekerjaan dirumah saja dan tidak dilibatkan dalam kegiatan di luar rumah yang berlangsung yang ada di Dusun seperti ikut andil menjadi anggota panitia penyelenggara atau bahkan menduduki posisi strategis di struktur organisasi maupun kepanitiaan. Dari hal tersebut, terlihat bahwa masyarakat Dusun Kalisidi memiliki kibat pada pondok pesantren tersebut. Meskipun tidak secara langsung menganggap bahwa pondok tersebut dijadikannya sebuah pedoman, namun dalam kegiatan keseharian maupun keagamaan yang juga meliputi musyawarah di tingkat dusun, masyarakat slalu mengutamakan *dawuh* dari para tokoh agama yang ada di Dusun Kalisidi. Selain itu masyarakat Dusun Kalisidi sebagian besar merupakan warga yang sangat taat dalam menjalankan petintah agama.

Banyaknya kegiatan yang ada di Dusun Kalisidi seharusnya menjadikan wadah bagi para perempuan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi, namun realitanya tidak banyak dari mereka yang terlibat atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Beberapa dari mereka yang diikutsertakan dalam partisipasi di berbagai kegiatan merupakan seorang yang memang selalu dipilih dan belum pernah ada kesempatan bagi perempuan lain masyarakat Dusun Kalisidi untuk ikut aktif berpartisipasi politik.

Berdasarkan pra observasi yang telah dilakukan peneliti pada proses pra penelitian. Menurut ketua organisasi keagamaan Muslimat NU ranting Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran barat, Kabupaten Semarang di rumahnya, bahwasanya sebenarnya perempuan di Dusun Kalisidi mempunyai inisiatif dan keinginan untuk bisa ikut andil dalam setiap kegiatan politik yang ada. Terlebih dari kualitas dan juga kuantitas perempuan di dusun kalisidi lebih unggul. Namun dalam hal tersebut

belum adanya kesempatan yang diberikan juga harus mengalah dan mengedepankan laki-laki untuk segala aspek, tak terkecuali di segi pengurusan Desa.

Melihat tingkat Pendidikan perempuan Dusun Kalisidi cukup baik dari segi pendidikan formal dan non-formal seperti hafidzoh, dan sarjana sangat disayangkan jika perempuan kurang dilibatkan dalam kegiatan di dusun yang berbentuk keorganisasian, pemerintahan, maupun kegiatan-kegiatan kecil yang menjurus pada pendidikan seperti mengajar ngaji dan juga jamaah sholat fardhu di masjid.

Padahal dari segi statistik, jumlah penduduk perempuan di Dusun Kalisidi lebih dominan daripada laki-laki. Hal tersebut seharusnya menjadikan perempuan lebih memiliki *power* atau kemampuan dan juga peran untuk menentukan proses pengambilan keputusan.

BAB IV
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN AKSES PEREMPUAN
DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA KALISIDI,
KABUPATEN SEMARANG

A. Partisipasi Politik Perempuan dan Akses Perempuan dalam Politik Desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Menurut Foucault (1990) menjelaskan bahwa partisipasi politik terjadi melalui proses kritis dan reflektif di mana individu menginterogasi kekuasaan dan kemampuan diri mereka sendiri untuk bertindak di luar struktur kekuasaan yang ada. Hal ini mencakup dengan mempertanyakan pemikiran dan praktek yang telah ditentukan oleh kekuasaan dalam masyarakat, sekaligus menyuarakan kebutuhan dan keinginan mereka sebagai individu.

Partisipasi politik tidak selalu terbatas pada pemilihan umum atau kegiatan politik formal lainnya. Sebaliknya, dia memandang partisipasi politik sebagai cara individu membentuk dirinya sendiri dan mengambil kontrol atas hidup mereka di dalam masyarakat.

Musyawarah tingkat RT maupun RW di dusun Kalisidi terbilang sering dilakukan. Jika dalam tingkat RT, biasanya bapak-bapak berkumpul pada malam jumat setelah melaksanakan kegiatan tahlilan rutin. Diakhir acara tahlilan tersebut, kemudian dilanjutkan untuk musyawarah membahas aspirasi dari masyarakat yang perlu dibahas atau disampaikan. Musyawarah tersebut rutin diadakan seminggu sekali pada malam jumat. Jika ada pembahasan yang tidak selesai pada musyawarah setelah tahlil tersebut akan dibahas kembali di tingkat Dusun dengan waktu yang kondisional dan insidental.

Beda dengan bapak-bapak, pertemuan rutin yang membahas tentang musyawarah ataupun diskusi di tingkat RT maupun dusun oleh ibu-ibu jarang diadakan. Para ibu-ibu cenderung hanya menitipkan keluhan

kesah ke suami/bapak mereka untuk nantinya bisa disampaikan dalam forum musyawarah tingkat RT tadi setelah kegiatan tahlil. namun tidak semua perempuan berani menyampaikan aspirasinya kepada yang bertanggung jawab. Kebanyakan perempuan Dusun Kalisidi lebih mengikuti apa yang akan menjadi hasilnya di musyawarah/pertemuan tersebut. seperti yang dijelaskan informan pada proses wawancara sebagai berikut :

“kalau orang sini biasanya ya lewat pak RT, tapi yo gak semua orang berani menyampaikan soal aspirasinya sih. Beberapa orang ada yang lebih milih “ah, manut wae lah” tapi sekali ada yang berani menyampaikan aspirasinya tu ya biasanya kalau dia gak dari kalangan orang tinggi/terpandang di sini ya kurang dihiraukan. Tapi kalau ada orang yang terpandang gitu meskipun pendapatnya gak begitu bagus yaa biasanya dianut. Beda lagi kalau orangnya gak begitu dipandang dan gak begitu disukai meskipun *omongane bener* kurang dianut. Ya begitulah politik” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Musyawarah di tingkat dusun biasanya diadakan ketika memang ada sosialisasi/penyuluhan ataupun pembahasan yang penting untuk dibahas. Dalam hal ini, musyawarah di tingkat dusun dilaksanakan kondisional. Biasanya topik pembahasan seputar pendanaan, pembangunan dusun, sosialisasi dari dinas terkait ataupun masalah perairan di Dusun Kalisidi. Dari banyaknya kegiatan musyawarah ataupun forum diskusi yang ada di Dusun Kalisidi, sangat jarang melibatkan perempuan didalamnya. Kecuali jika yang dibahas terdapat beberapa pembahasan yang melibatkan perempuan seperti contoh masalah konsumsi. Di luar itu, biasanya yang ikut dalam musyawarah atau yang aktif berpartisipasi hanyalah orang-orang tertentu yang memang sering ikut atau sering dilibatkan dalam berbagai acara. Namun dalam presentasinya, perempuan masih sangat sedikit yang ikut serta andil dalam berpartisipasi politik. Seperti yang disampaikan oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut:

“kalau musyawarah tingkat dusun itu diadakan secara rutin itu tidak, hanya jika dibutuhkan saja. Jika tingkat dusun juga jarang sekali melibatkan perempuan atau ibu-ibu untuk mengambil keputusan. Tapi akhir akhir ini sering dilakukan pertemuan karena mau ada acara halah bi halal tingkat desa yang kebetulan tuan rumahnya Dusun Kalisidi” (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan lain sebagai berikut:

“kalau masalah umum-umum perempuan yo gak sama sekali diajak. Tapi kalau perempuan yo paling disuruh bagian konsumsi tok. Biasanya juga perempuan hanya sebatas pendengar dan penonton (jika dilibatkan) karena yo biasanya sudah ada rembuk jadi. Kalo sini ya lebih ke sami’na wa ato’na”(Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

“kalau musyawarah tingkat dusun jarang diadakan, biasanya yo yang sering tingkat RT, biasanya kalau ada kumpulan tingkat Dusun yang berlangsung private dan gak semua ikut juga. Biasanya yang ikut bapak-bapak, kalo ibu-ibu diikutkan kalau ada pembahasan masak, konsumsi, dan belanja makanan saja” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

“perempuan aktif nek dusun ki paling pas acara akhirusanah, nek berpendapat karo kumpulan-kumpulan kui jarang. Nek akhirusanah ki aktive biasane nek pas istirahat paling ewang-ewang ngedumke snack atau konsumsi ngono kui” (Wawancara Gilang, Anggota Karang Taruna. 21 Maret 2023)

Namun pada 3 tahun terakhir ini, tingkat partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi terbilang cukup meningkat. Meskipun jika dilihat dari masa lalu, perempuan di Dusun Kalisidi sama sekali tidak pernah terlibat dalam berbagai kegiatan partisipasi politik yang ada khususnya dalam musyawarah. Adanya kondisi semacam ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan dan dikonfirmasi sebagai berikut:

“kalau kita mengacu pada 20 tahun yang lalu, perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam partisipasi

politik yang ada di dusun, namun kalau hari ini sudah ada keterwakilan perempuan di dalamnya meskipun tidak banyak dan juga melihat apa yang dibahas” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Kemudian hal serupa juga dijelaskan dalam proses wawancara kepada informan lain sebagai berikut :

“untuk saat ini sudah lumayan kak, daripada yang dulu. Karena kalau dulu perempuan dianggapnya kan pendapatnya tidak begitu dihiraukan. Kalau dulu di sini slalu yang lanang yang di pakai pendapatnya” (Wawancara Ibu Deswi, Kepala RA, 22 Maret 2023)

Hal tersebut bisa dilihat dalam riwayat kegiatan musyawarah ataupun kegiatan kemasyarakatan yang ada di Dusun Kalisidi, seperti sosialisasi pendirian tower, musyawarah pendanaan makam, sosialisasi kelompok tani, rapat acara akhirusannah, tasyukuran perbaikan jalan, dan iriban. Masyarakat perempuan dusun kalisidi yang terlibat hanya 10% dari jumlah anggota yang hadir dan cenderung tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Gambar 4. 1

Tradisi *Iriban* Warga Dusun Kalisidi



Sumber : Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Gambar diatas merupakan gambaran suasana kegiatan iriban di Dusun Kalisidi. Iriban sendiri merupakan sebuah tradisi masyarakat desa Kalisidi yang mana kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk syukuran atas pengairan yang akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan pertanian dan juga peternakan yang berada di Dusun Kalisidi. Bagi masyarakat Desa Kalisidi kegiatan tersebut sangatlah penting karena air merupakan sumber kebutuhan dalam kehidupan. Kegiatan iriban tersebut biasanya diikuti oleh para petani dan peternak seluruh Desa Kalisidi yang memiliki lahan di daerah Dusun Kalisidi Acara iriban sendiri rutin diadakan setian 3 bulan sekali atau menjelang musim penanaman padi. Acara tersebut dibuka dengan doa yang dilakukan di sekitar lahan pertanian dan peternakan. Kemudian setelah doa, dilanjut dengan makan bersama sebagai bentuk rasa kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin di dalam masyarakat Desa Kalisidi. Terlihat pada gambar tersebut, jumlah partisipan perempuan hanya sedikit. Dari informasi yang didapat oleh Kepala Dusun Kalisidi, jumlah pasrtisipan pada acara tersebut sekitar 50 orang dan hanya ada 4 perwakilan perempuan yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selebihnya, partisipan dalam kegiatan *iriban* didominasi oleh laki-laki. Padahal acara tersebut berlaku untuk umum khususnya untuk masyarakat Desa Kalisidi.

Gambar 4. 2

Sosialisasi Pendirian Tower Listrik



Sumber : Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Gambar diatas merupakan kegiatan yang tidak lama ini dilakukan oleh masyarakat Dusun Kalisidi. Kegiatan tersebut adalah sosialisasi tentang pendirian tower/menara telekomunikasi oleh PT. Centratama Menara Indonesia kepada masyarakat Dusun Kalisidi. Pihak yang bertanggung jawab dalam pendirian tower/menara tersebut melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Dusun kalisidi agar tidak adanya salah paham dalam maksud dan tujuan rencana pendirian tower/menara di wilayah Dusun Kalisidi. Meskipun pada sebelumnya masyarakat Dusun Kalisidi menolak adanya pembangunan tower/menara tersebut namun setelah diadakannya sosialisasi tersebut hasil akhir dari musyawarah adalah diperbolehkannya pembangunan tower/menara dari masyarakat Dusun kalisidi. Kemudian dapat dilihat bahwa acara sosialisasi pendirian tower/menara tersebut tidak ada partisipan perempuan didalamnya kecuali dari Kepala Dusun. Jumlah partisipan dari masyarakat Dusun Kalisidi sendiri sebanyak 15 orang dan hanya terdapat 1 perwakilan perempuan yaitu dari kepala dusun kalisidi sendiri.

Gambar 4. 3

Rapat Acara Akhirusanah



Sumber : Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Dalam gambar tersebut memperlihatkan suasana rapat acara Akhirusanah Pondok Pesantren Al-Uqola'. Akhirusanah sendiri merupakan sebuah acara rutin satu tahun sekali yang diadakan oleh satu satunya pondok pesantren tahfidzul quran yang berada di Dusun Kalisidi bernama Al-Uqola'. Acara tersebut juga melibatkan seluruh masyarakat Dusun Kalisidi. Acara yang diadakan satu hari penuh tersebut diawali dengan karnaval/pawai mengelilingi Dusun Kalisidi yang pesertanya merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Uqola' dan juga anak-anak dan remaja Dusun Kalisidi. Kemudian setelah diakhir acara karnaval seluruh partisipan karnaval berkumpul di titik akhir yaitu di halaman PonPes Al-Uqola untuk menyaksikan atraksi dari Group Drum Band yang juga ikut memeriahkan acara tersebut. Kemudian setelah itu, didalam acara akhirusanah ditutup dengan acara wisudawan-wisudawati santri tahfidzul quran dan pengajian oleh tokoh agama setempat. Terlihat dari kegiatan rapat tersebut,tidak ada perwakilan dari partisipan perempuan lainya selain Kepala Dusun kalisidi yang diikutkan dalam kepanitiaan acara akhirusanah tersebut. Selebihnya panitia acara akhirusanah diisi oleh pengurus ponpes Al-Uqola' beserta jajaran ustadz yang mengampu di ponpes tersebut. Para ustadz yang mengajar di PonPes tersebut juga merupakan masyarakat Dusun Kalisidi sendiri.

Gambar 4. 4

Tasyukuran Perbaikan Jalan



Sumber: Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Gambar diatas merupakan dokumentasi acara tasyukuran pengaspalan jalan oleh masyarakat Dusun Kalisidi. Dalam acara tersebut tersebut menghadirkan anggota dewan yaitu Wisnu Wahyudi dan Bagus Suryokusumo yang merupakan anak dari ketua DPRD Jawa Tengah. Terlihat dalam gambar tersebut yang menghadiri acara tasyukuran hanya dari masyarakat laki-laki Dusun Kalisidi. Selibhnya masyarakat perempuan hanya sebatas membantu di persoalan konsumsi saja. Meskipun dalam undangan yang disebar, seluruh masyarakat Dusun kalisidi boleh ikut serta mengikuti acara tasyukuran jalan tersebut

Gambar 4. 5

Musyawah Pendanaan Makam Gumuk



Sumber: Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Dalam gambar tersebut memperlihatkan suasana musyawarah terkait pelebaran makam gumuk. Makam gumuk sendiri merupakan satu-satunya makam yang berada di Dusun Kalisidi. Biasanya masyarakat Dusun Kalisidi yang meninggal akan dikebumikan di makam tersebut. Musyawarah tersebut membahas tentang pendanaan terkait makam gumuk yang sudah penuh lahanya dan akan diadakan pelebaran. Informasi yang diperoleh dari Kepala Dusun Kalisidi, musyawarah tersebut berjumlah sekitar 15 partisipan yang mana Kepala Dusun merupakan satu-satunya partisipan perempuan pada musyawarah tersebut.

Gambar 4. 6
Sosialisasi Kelompok Tani



Sumber: Ponsel Bu Tantri (Kepala Dusun)

Gambar tersebut memperlihatkan suasana sosialisasi kelompok tani oleh PPL desa Kalisidi. Kegiatan tersebut membahas seputar pengelolaan lahan sawah dengan optimal tanpa menggunakan pupuk urea. Dari informasi yang didapat oleh kepala dusun kalisidi, jumlah partisipan dalam

kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak 20 orang yang mana 4 diantaranya merupakan perempuan dan 16 adalah partisipan laki-laki.

Dalam lingkungan yang masih erat dengan budaya patriarki, perempuan seringkali dibatasi pergerakannya untuk bisa aktif di berbagai kegiatan. Di Dusun Kalisidi, masyarakat perempuan seringkali diabaikan kehadirannya untuk bisa ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Khususnya pada kegiatan politik, partisipasi perempuan dalam ranah politik masih cenderung kurang, hal tersebut dikarenakan selain adanya budaya patriarki, perempuan dusun kalisidi masih kurang diberi kesempatan untuk bisa terlibat aktif diberbagai kegiatan maupun kepanitian.

Seperti data yang diperoleh dari proses wawancara, informan mengatakan bahwa perempuan Dusun Kalisidi sebenarnya juga ingin ikut andil dalam berbagai musyawarah, rapat, sosialisasi, ataupun diskusi yang ada. Namun seringkali perempuan Dusun Kalisidi kurang diberikan kesempatan dan juga tidak berani untuk bisa tampil. Perempuan Dusun Kalisidi sendiri masih *sungkan* atau malu jika disuruh untuk terlibat dalam kegiatan politik yang berjalan di Dusun Kalisidi. Hal tersebut tidak lain karena, adanya budaya patriarki yang turun temurun telah menjadi budaya pola pikir masyarakat Dusun Kalsidi.

“menurut pengamatan saya, perempuan di Dusun Kalisidi tidak semuanya bodoh, yang berkompeten ke situ sebenarnya yo ada, cuman tidak ada keberanian untuk bisa dilihat. Faktornya ya kurang percaya diri dan ada rasa takut jika pendapatnya di tolak. Terus juga tidak diberikan kesempatan atau ruang untuk bisa usul udah itu saja”
(Wawancara Ibu Musta’anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh informan lain sebagai berikut:

“kalau ketertarikan untuk bisa speak up atau sebatas mengusulkan ide/pendpat perempuan sini pasti ada yang mau si, cuman biasane karena cewek ya paling pada manut wae. Wong cewek paling pendapate kurang begitu

dirungoke” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Di dusun kalisidi sendiri memiliki beberapa keunikan dalam sosial keagamaanya. Perempuan Dusun Kalisidi tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan untuk sholat jamaah fardhu di masjid dikarenakan memang adanya ajaran bahwa perempuan baiknya memang sholat di rumah. Hal tersebut di konfirmasi oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut :

“kalo berbicara soal fiqh, perempuan memang lebih sah sholatnya dirumah. Tapi kalo majelis ilmu atau pengajian itu beda lagi. Hadist yang mengatakan sholat jamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri itu hanya untuk laki-laki. Meh digoleki kitab ndi wae yo ketemune kui, tujuan fiqh begitu yo tidak lain tidak bukan untuk menghormati dan menjaga perempuan” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Kemudian informan lain juga berpendapat serupa seperti berikut :

“perempuan tidak diperkenankan jamaah fardhu, hanya tarawih dan sholat ied itu dawuhe Mbah Khumaidi. Beliau itu menyampaikan isinya kitab yo to. Kan gitu to, wong wedok ki sholate apike neng omah” (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

“jelas ada sih, ajaran-ajaran kayak norma-norma bahwa perempuan itu seharusnya yah kayak tadi (dirumah dan di dapur saja) kayak mendukung patrarkis semakin tinggi tuh kek jadi norma-norma yang tidak tertulis yang diucapkan sama mereka, kek aku juga korban jaman kecil kalau patrarkis sekentel itu tapi sekarang sudah agak sedikit memudar ya apalagi bu Tantri juga mendobrak menjadi Kadus” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Hal tersebut yang menggambarkan bahwa sudah dari dulu masyarakat perempuan Dusun kalisidi melaksanakan ibadah sholat di rumah saja. Kecuali jika sholat Ied ataupun tarawih, masyarakat perempuan Dusun kalisidi baru diperbolehkan untuk ikut jamaah di masjid maupun mushola yang ada disekitar. Perempuan di Dusun Kalisidi

cenderung mengikuti dan menerima ajaran yang sudah ada sejak lama di lingkungan mereka. Secara tidak langsung, ajaran yang memang tidak tertulis tersebut menghasilkan perempuan di Dusun Kalisidi yang terbatas lingkup gerakannya untuk bisa tampil dan mengikuti kegiatan sosial maupun politik yang ada. Mereka cenderung berfikir bahwa perempuan hanya pantas untuk melakukan kegiatan di dalam rumah dan di dapur saja. Kemudian pola pikir seperti itu menjadikan *mindset* dalam masyarakat Dusun Kalisidi. Bahwasanya, perempuan tidak diperkenankan untuk bisa ikut andil dalam suatu kegiatan yang berlangsung kecuali kegiatan tersebut ada pembahasan soal konsumsi.

Kemudian jika dilihat dari sisi budaya, dari mayoritas informan menyampaikan bahwa terdapat adanya ajaran-ajaran seperti norma-norma, etika, budaya, nilai-nilai yang memang diajarkan sudah sejak lama yang kemudian menjadi prinsip oleh masyarakat Dusun kalisidi. Namun ada beberapa informan menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada. Seperti yang disampaikan oleh informan lain sebagai berikut :

“gak ada, saya melihat hanya naluri/perasaan perempuan saja. Itu secara umum lho ya, tidak secara pribadi/pendapat personal saya” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Dalam persoalan keluarga, perempuan Dusun Kalisidi juga seringkali kurang berdaya. Mereka cenderung kurang memiliki peran untuk bisa ikut andil dalam mengatur persoalan keluarga, khususnya dalam pendidikan. Biasanya, para ibu-ibu Dusun Kalisidi seringkali mengalah jika hal tersebut sudah yang mengatur suami/kepala keluarga. Seperti jika anak mereka tidak ingin lanjut sekolah, kemudian hal tersebut diperbolehkan oleh suami/kepala keluarga, peran ibu yang sebenarnya memberikan dukungan untuk harus sekolah kepada anaknya terhalang oleh suami/kepala keluarga yang memperbolehkan hal tersebut. seperti halnya yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“kalau soal mengurus anak/parenting, perempuan di dusun Kalisidi ini masih sangat kurang keterwakilannya untuk bisa ikut campur dalam masalah tersebut” (Wawancara Ibu Musta’anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Karena masih kurang dilibatkan dalam setiap proses politik yang ada baik musyawarah maupun kegiatan lainnya, perempuan di Dusun kalisidi biasanya menyampaikan aspirasi atau keluhan kesah terakit pembangunan ataupun acara yang berlangsung di Dusun adalah melalui kepala keluarga dirumah. Selain itu, biasanya masyarakat yang lain pun sering menyampaikan aduannya langsung ke kepala dusun melalui *chat whatsapp*. Hal tersebut lebih disukai oleh pemimpin dusun karena penyerapan aspirasi lebih cepat tertangani dan lebih efisien. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan informan sebagai berikut :

“biasanya kalau ada apa-apa itu ya langsung ke saya, telfon atau via chat wa. Seperti bu itu depan MI longsor, trus kalau biasa ketemu gak sengaja juga pasti adalah yang biasa mengadu” (Wawancara Ibu Tantri, Kepala Dusun, 21 Maret 2023”

Masyarakat Dusun Kalisidi masih menganggap bahwa tugas utama perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga dan berada di dapur. Selain itu, perempuan di Dusun kalisidi juga menganut prinsip *sami’na wa ato’na* di berbagai kegiatan, terlebih dalam musyawarah ataupun perkumpulan dan keikutsertaan dalam organisasi/kepanitiaan. Hal tersebut menjadikan kurangnya keikutsertaan perempuan Dusun Kalisidi dalam setiap kegiatan politik yang berlangsung di tingkat dusun maupun desa. padahal dari segi kualitas maupun kuantitas, perempuan di Dusun Kalisidi lebih unggul daripada laki-laki.

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bu Musta’anah selaku Guru MI Kalisidi, bahwa yang masih memiliki motivasi untuk menuntut ilmu adalah sebagian besar berasal dari masyarakat perempuan.

“Di RW 06 ini yang mau menuntut ilmu dari remaja laki-laki ataupun perempuan, justru lebih banyakan dari sisi

perempuan dan yang sampai lulus itu juga remaja putri. Banyak yang putus tengah jalan hanya sampai SMP saja itu kebanyakan laki-laki” (Wawancara Ibu Musta’anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kemudian hal serupa juga dikonfirmasi oleh informan lain dalam proses wawancara. Peneliti menanyakan perihal partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Peneliti mendapat jawaban sebagai berikut :

“ya agak masih kurang, karena sebagian laki-laki masih berfikir bahwa perempuan itu gak perlu punya pendidikan tinggi-tinggi. Kewajiban seorang perempuan ya di rumah saja, mengurus keluarga, berada di dapur. Padahal kak, mayoritas perempuan yang remaja di Dusun Kalisidi itu sarjana lho” (Wawancara Ibu Deswi Puji, Kepala RA, 23 Maret 2023)

Seperti data yang didapat dari Balai Desa Kalisidi, jumlah masyarakat Dusun Kalisidi khususnya masyarakat perempuan lebih banyak yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat perempuan di Dusun Kalisidi sebenarnya dari segi kualitas dan kuantitas lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Jumlah Masyarakat Dusun Kalisidi yang Menempuh Pendidikan ke Perguruan Tinggi

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	Mahasiswa/Mahasiswa	97	135	232

Sumber : Balai Desa Kalisidi 2022

Hal tersebutlah yang membuat masyarakat perempuan Dusun Kalisidi masih pasif dalam keikutsertaan untuk terlibat langsung di setiap proses politik yang ada. Perempuan Dusun kalisidi masih tertahan oleh

budaya patriarki yang menjadi karakter pada masyarakat Dusun Kalisidi. Selain itu, perempuan Dusun Kalisidi cenderung tidak percaya diri dan *sungkan* apabila ingin aktif dan terlibat langsung dalam partisipasi politik dikarenakan kurangnya kesempatan dan ruang untuk berpendapat yang mengakibatkan perempuan Dusun Kalisidi jarang untuk tampil di kegiatan politik yang ada.

Pada tahun 2021 lalu, Dusun Kalisidi untuk pertama kalinya dipimpin oleh pemimpin yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut pasti akan menjadi sebuah polemik bagi masyarakat Dusun Kalisidi, karena dalam karakter masyarakat Dusun Kalisidi masih tertanam kuat budaya patriarki. Dimana budaya patriarki tersebut adalah merupakan Sistem sosial dan budaya di mana para pria memiliki kekuasaan dan kontrol atas keputusan dan sumber daya ekonomi, politik, dan sosial dalam masyarakat. Patriarki sering dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender karena sering kali menghasilkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dan orang lain yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ditetapkan oleh patriarki. (Israpil, 2017)

Beberapa masyarakat Dusun Kalisidi juga menyayangkan dan merasa tidak cocok dengan pemimpin perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam proses wawancara dengan informan sebagai berikut :

“saya sebenarnya kurang setuju sih mba kalau pemimpin dusun itu perempuan, apalagi bukan dari warga sini”(Wawancara Mas Muhammad Alfin, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya rasa tidak setuju dari masyarakat Dusun Kalisidi jika Dusun Kalisidi dipimpin oleh pemimpin yang berjenis kelamin perempuan. Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut :

“kalau boleh berpendapat, kadus itu sistemnya salah. UU nya keliru, karena kadus itu kepala unsur wilayah, beda dengan kaur (kepala urusan). Itu memang

kalau dipilih melalui ujian itu cocoknya kalau kaur, kalau kadus yo ojo koyok kaur itu salah. Kudune kadus yo podo dengan kades, kudune masyarakat dusunya itu terlibat dalam penentuannya. Kalau kadus sing di urusi masyarakat, yo sing milih masyarakat, rak setuju nek aku”(Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

Dari informasi yang diutarakan oleh informan tersebut, menganggap bahwa harusnya yang menjadi pemimpin dusun adalah yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Bukan yang berasal dari luar wilayah yang akan di pimpin.

Beda dengan sudut pandang informan laki-laki, dalam proses wawancara informan perempuan lebih suka jika Dusun Kalisidi dipimpin oleh pemimpin perempuan. Hal tersebut akan menjadikan perubahan dalam budaya yang selama ini tertanam dalam masyarakat Dusun Kalisidi. Seperti pernyataan informan pada saat wawancara sebagai berikut :

“kita sebagai seorang wanita di pimpin oleh seorang wanita itu ada perasaan nyaman kak, kalau dulu kan nek perempuan itu memimpin kesannya dianggap aneh, perempuan kok dadi pemimpin gitu kan kak” (Wawancara Ibu Deswi Puji, Kepala RA, 23 Maret 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut :

“kalau saya pribadi merasa puas sih yang memimpin Bu Tantri, keren dia bisa sedikit mendobrak budaya patriarki yang ada disini. Dia juga menjadi Kadus pertama perempuan di siini kan, jadi yo pasti dia udah berusaha maksimal mungkin buat memimpin sini yang memiliki budaya sendiri dibanding Dusun lianya. Tapi kalau dilihat dari segi pemberdayaan terhadap perempuan kayaknya masih kurang sih” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Adanya fenomena tersebut juga disebabkan karena selain berjenis kelamin perempuan, masyarakat Dusun Kalisidi tidak begitu setuju jika yang menjadi pemimpin dusun mereka bukan dari masyarakat asli Dusun Kalisidi. Seperti yang dijelaskan dalam proses wawancara oleh informan sebagai berikut:

“saya waktu itu mbatin, kok sing dadi (Kepala Dusun) kok rak cah kene dewe. sing wong kene daftar kok yo rak menang, nek pilihan masyarakat yo mesti menang wong kene pengene yo sing mimpin seko wong kene dewe. Karena Kadus kan pemimpin 24 jam, kita kan kalau ada masalah datang kerumahnya. Lah kalo ngekost kan dadi rak penak meh dolan neng omahe. Nek omahe dewe yo enak” (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

Sejauh ini partisipasi politik perempuan yang ada di Dusun Kalisidi masih terbilang sangat rendah dan belum sesuai harapan masyarakat Dusun Kalisidi. Masyarakat Dusun Kalisidi khususnya perempuan menginginkan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi lebih aktif dan lebih banyak yang berani untuk bisa tampil di berbagai kegiatan terutama dalam forum musyawarah. Mereka ingin perempuan lebih sering dilibatkan ke dalam kegiatan yang ada tidak hanya sebatas dalam bagian konsumsi saja, namun dari aspek yang lebih dari itu.

“Partisipasi politik perempuan disini belum sesuai harapan, karena ya belum berpartisipasi secara maksimal. Kalau saya lihat ya gara-gara rasa sungkan perempuan di sini masih tinggi.” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh informan lain sebagai berikut:

“belum sesuai harapan saya. Karena ya itu tadi adanya stigma sosial yang bilang kalau perempuan harusnya sami'na wa atho'na. kemudian tidak adanya keberanian dan kurangnya kesempatan dalam rumah tangga juga mba, istilahe kurang teges karena selalu kalah dengan kepala keluarga” (Wawancara Ibu Musta'anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kemudian di sisi lain, informan lain juga menyatakan serupa sebagai berikut:

“masih kurang, jadi rata-rata tu perempuan di Dusun Kalisidi tuh masih banyak mindernya sama malu gitu buat mengutarakan pendapatnya kayak gak PD gitu”

(Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

“jelas belum sih. Yakan tadikan mbalik lagi kayak presentase perempuan disini, di kepemimpinan atau acara apapun tuh cuman sedikit biasanya cuman dilibatkan kalau ada acara sewelasan gitu-gitu aja bagian belakang bagian konsumsi, bagian depan cuman nyalami tamu gitukan tu kayak bener bener kurang banget sih” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Masyarakat dusun kalisidi sendiri mengaku bahwa terdapat adanya ajaran atau norma-norma yang berlaku di Dusun Kalisidi dan di jalani oleh masyarakat Dusun Kalisidi. Norma-norma atau ajaran tersebut sudah lama dan diyakini oleh masyarakat Dusun Kalisidi, meskipun ajaran tersebut tidak tertulis namun hal tersebut sangat membuat ketimpangan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi. Seperti yang di sampaikan dalam proses wawancara sebagai berikut:

“kalau disini ya pada mengacu ke norma aga, meskipun tidak tertulis namun masyarakat meyakini dan menjalaninya karena emang dari dulu budayanya seperti itu. Karena norma sosial disini juga mengikuti norma agama” (Wawancara Ibu Musta'anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh informan lain sebagai berikut:

“kalau menurut saya ya ajaran-ajaran tersebut ada cuman, udah dari dulu ya makanya generasi-generasi yang sekarang ini tu gak ada yang tahu. Cuman sebatas mengikuti ajaran yang sudah ada. Tapi mereka gak tahu dasarnya yang mengajarkan siapa, dari siapa, dan kapan diajarkanya” (Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

Terlihat bahwasanya, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi dalam kegiatan sosial khususnya dalam ranah politik cenderung sangat rendah, selain karakter masyarakat Dusun Kalisidi masih tertanam kuat pada budaya patriarki, perempuan dalam keterlibatan di bidang sosial dan politik juga

masih belum memiliki akses maupun kesempatan untuk bisa diikuti sertakan dalam setiap kegiatan. Di berbagai pertemuan maupun musyawarah, perempuan di Dusun Kalisidi juga cenderung tidak memiliki kesempatan ataupun ruang untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara percaya diri dan terbuka.

Biasanya perempuan di dusun Kalisidi akan dilibatkan dalam pertemuan baik untuk pembahasan kegiatan maupun pembentukan kepanitiaan dan juga musyawarah hanya jika terdapat kebutuhan dalam bagian konsumsi saja, selebih itu hanya pada bagian penerima tamu. Selain itu, adanya ajaran yang sudah tertanam pada karakter masyarakat Dusun Kalisidi seperti perempuan yang tidak diperkenankan sholat jamaah di masjid membuat para masyarakat Perempuan Dusun Kalisidi sedikit dibatasi pergerakannya terlebih dalam ibadah. Hal tersebut secara tidak langsung membuat kebebasan bersosial perempuan di Dusun Kalisidi sedikit agak terbatas dan akan berimbas pada kegiatan lain yang mengira bahwa perempuan hanya cocok berkegiatan dirumah dan didapur saja

B. Analisis Mengkaitkan dengan Teori Michel Foucault

Partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang rendah masih menjadi pembahasan yang serius. Faktanya, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi masih jauh dan rendah dari jumlah partisipasi politik laki-laki yang terlibat. Dalam hal ini, teori relasi kuasa Michel Foucault dapat diterapkan dalam analisis terhadap partisipasi politik perempuan yang rendah.

Pertama, dalam teori relasi kuasa Foucault, kekuasaan didistribusikan dan dijalani sebagai suatu proses yang melibatkan semua orang sehingga berarti bahwa partisipasi politik dapat dipahami sebagai suatu interaksi antar individu yang mengintrogasi kekuasaan. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi bisa diartikan bahwa mereka tidak memiliki daya untuk mempengaruhi

kekuasaan politik yang berlaku. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak diberikannya kesempatan ataupun ruang untuk perempuan dalam berpartisipasi atau berpendapat yang menyebabkan perempuan di Dusun Kalisidi cenderung takut dan *sungkan* jika ingin turut aktif dalam kegiatan politik yang berlangsung. Hal tersebut kemudian menjadikan perempuan Dusun kalisidi tidak ada keberanian untuk bisa memperlihatkan bahwa dirinya sanggup untuk juga bisa diikutsertakan dalam kegiatan atau setiap proses politik yang ada. seperti yang disampaikan oleh Bu Mustaaanah pada proses wawancara sebagai berikut :

“...faktornya yang kurang percaya diri pada takut untuk mengeluarkan pendapat, takut kalau pendapatnya ditolak, karena ya tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat juga, gak ada ruang untuk usul” (Wawancara Ibu Musta’anah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kedua, dalam teori Foucault (2002) menekankan bahwa kekuasaan dihasilkan dari proses yang kompleks dan sulit dikontrol. Partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang rendah dapat dijelaskan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang kompleks dan sulit dimengerti oleh perempuan. Karena demikian, perempuan merasa sangat kesulitan untuk memahami dan memperjuangkan haknya sendiri dalam konteks politik. seperti yang dijelaskan oleh informan ketika proses wawancara sebagai berikut:

“kalau menurut saya ya ajaran-ajaran tersebut ada cuman, udah dari dulu ya makanya generasi-generasi yang sekarang ini tu gak ada yang tahu. Cuman sebatas mengikuti ajaran yang sudah ada. Tapi mereka gak tahu dasarnya yang mengajarkan siapa, dari siapa, dan kapan diajarkanya” (Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

Ketiga, teori relasi kuasa Foucault (1990) juga menegaskan bahwa kekuasaan itu dapat mencapai setiap tataran atau level dari masyarakat. Partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya hak dan kesempatan maupun ruang

berpendapat untuk memperoleh akses ke informasi yang dibutuhkan untuk terlibat dalam proses politik, terutama di dalam musyawarah maupun forum lainya.

Keempat, kekuasaan dalam pandangan Foucault adalah sesuatu yang terus menerus dirundingkan, diperjuangkan, dan diperebutkan oleh suatu kelompok atau individu. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang rendah bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk menjalankan peran sebagai aktor politik maupun anggota sekalipun yang aktif terutama dalam hal keterlibatan proses musyawarah yang dapat berdampak langsung pada perempuan. Seperti halnya yang di sampaikan oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut:

“kalau masalah umum-umum perempuan yo gak sama sekali diajak. Tapi kalau perempuan yo paling disuruh bagian konsumsi tok. Biasanya juga perempuan hanya sebatas pendengar dan penonton (jika dilibatkan) karena yo biasanya sudah ada rembuk jadi. Kalo sini ya lebih ke sami’na wa ato’na”(Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kelima, kekuasaan dalam pandangan Foucault merupakan proses yang intensif dan terus menerus dimana kekuasaan hanya mampu terjaga atas dasar pengawasan dan konsolidasi masyarakat tersebut terjadi dalam partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang seharusnya memperlihatkan kekuasaan terhadap hak-hak perempuan kemudian diabaikan atau terhalang oleh pengawasan dan konsolidasi kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan tujuan politik perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan yang menyatakan jika sebenarnya perempuan tidak harus diikuti dalam setiap proses politik yang ada. Hal tersebut jelasnya sebagai berikut:

“yo rak kudu, rak kudu. Nek UU mengatur partisipan perempuan kudu setidaknya 30% kan itu sebuah pemaksaan. Nek bebas yo bebas, kok ndadak dipaksa untuk

memenuhi 30%. Nek meh melu yo keno, orak yo keno. Ojo dipaksa, UU salah iku, kenopo kudu dipaksa 30%?" (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

Keenam, dalam teorinya Foucault (1997) mengemukakan bahwa kekuasaan hadir pada segala tempat dan terlihat dalam berbagai skenario kehidupan. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan di dusun Kalisidi yang rendah disebabkan bahwa perempuan tidak menganggap partisipasi politik sebagai suatu hal yang penting dan tidak menyadari bahwa dengan partisipasi politik akan terwujudnya dukungan hak perempuan dalam politik. Seperti contoh dalam kegiatan musyawarah dan kegiatan sosial lainnya, perempuan Dusun Kalisidi cenderung sering tidak dilibatkan. Padahal dari hal tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih dan akan lebih meningkatkan kesadaran atas hak-hak dalam responsif gender.

Kemudian dalam teorinya Foucault juga menganjurkan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari posisi sosial dan individu itu sendiri. Karena demikian, rendahnya partisipasi politik perempuan bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, posisi sosial yang lemah, atau hanya sebagai pengikut. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya budaya terdahulu yang menghambat akan pergerakan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi seperti budaya patriarki yang tertanam kuat pada masyarakat Dusun Kalisidi kemudian menganggap bahwa perempuan hanya pantas untuk kegiatan di dalam rumah saja.

Dalam teorinya, Foucault mengajukan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan suatu hubungan sosial yang tersebar di seluruh masyarakat. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan kontrol, namun juga praktik-praktik normal dan rutin yang terjadi secara terus menerus di dalam masyarakat.

Dalam pembahasan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi yang rendah, teori Foucault sangat relevan karena partisipasi politik tidak hanya terkait dengan proses pemilihan umum dan keterlibatan di dalam partai politik, namun juga praktik-praktik sehari-hari yang terkait dengan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan pemanfaatan kebijakan publik.

Partisipasi politik perempuan di tingkat dusun maupun desa seringkali mengalami ketidaksetaraan karena adanya stigma patriarki yang berjalan mulus dan juga sudah menjadi budaya dalam karakter masyarakat. Stigma patriarki ini bersifat normal dan terus menerus ditanamkan dalam pikiran masyarakat, sehingga sulit untuk dilawan oleh perempuan yang berada di dalamnya. Dalam dunia politik budaya tersebut akan berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh laki-laki secara kolektif, kurang diberikan kesempatan atau pengabaian terhadap pendapat dan juga pemikiran perempuan di dalam rapat atau forum, serta kurangnya akses perempuan terhadap informasi politik dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik lainnya.

Dengan demikian, teori Foucault menawarkan perspektif bahwa kekuasaan dan diskursus yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan di tingkat dusun/desa yang rendah. Seharusnya perempuan dapat merespon kekuasaan dan disiplin yang ada dengan cara melawan atau mengekspresikan resistensi terhadap budaya patriarki tersebut yang merugikan keterlibatan mereka di dalam politik.

BAB V
RELASI KUASA DALAM POLITIK DESA DI DUSUN KALISIDI, DESA
KALISIDI, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN
SEMARANG

A. Kekuasaan dalam Pengetahuan Menurut Michel Foucault

Menurut Foucault (1995), kekuasaan tidak hanya milik pemerintah, tetapi ada di seluruh sudut kehidupan kita. Kekuasaan adalah suatu hubungan antara individu dan kelompok yang kemudian berinteraksi dan terjadi antara dua pihak tersebut menciptakan suatu sistem kekuasaan yang kompleks. Buah analisis oleh Foucault sendiri mengenai kekuasaan mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hanya terkait dengan hukum atau pemerintah, tetapi juga ada di dalam budaya kita sehari-hari. Masyarakat selalu berada di tengah-tengah sudut kekuasaan yang terus berubah dan bergeser sesuai dengan masa dan tempat. (Foucault, 1990)

Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dihasilkan dan dipertahankan melalui kebijakan, pandangan/presepsi, dan praktek yang kemudian mengendalikan perilaku, identitas, dan pengetahuan. Foucault sendiri mengkritik pandangan tradisional yang menganggap kekuasaan sebagai monolitik atau terpusat. Menurutnya, kekuasaan sebenarnya tersebar di antara berbagai lembaga dan interaksi sosial.

Analisis Foucault yang mengenai kekuasaan menunjukkan bahwa kekuasaan juga dapat dibangun melalui proses pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Misalnya, pandangan yang menganggap satu jenis pengetahuan lebih superior dibandingkan dengan yang lain dapat menciptakan suatu sistem kekuasaan yang membedakan antara yang “benar” dan yang “salah”. Foucault memperlihatkan bahwa konsepsi kebijaksanaan, tindakan, dan bahkan kebenaran adalah hasil dari industri kekuasaan yang terus menerus. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan

seringkali dihasilkan melalui proses sehari-hari yang diabaikan oleh banyak orang. (Foucault, 1972)

Michel Foucault sendiri adalah seorang filsuf dan sejarawan Prancis yang dikenal dengan karyanya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Ia menafsirkan dalam teorinya bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan menghasilkan kekuasaan. Terdapat saling hubung antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat otoriter dan terpusat, tetapi juga tersebar dan terintegrasi dalam masyarakat. Pengetahuan, menurut Foucault, adalah produk dan instrumen dari kekuasaan.

Foucault menganggap pengetahuan sebagai bentuk kekuasaan. Dalam bukunya, "Arkeologi Pengetahuan," Foucault (1972) memperlihatkan bagaimana praktik kekuasaan menjadi bagian dari cara kita menghasilkan pengetahuan, dan sebaliknya. Pengetahuan tentang "normal" dan "abnormal," "sehat" dan "sakit" misalnya, diproduksi dan dijaga oleh pusat kekuasaan tertentu.

Foucault mengatakan bahwa kekuasaan tidak begitu saja dimiliki oleh satu pihak yang otoriter. Sebaliknya, kekuasaan tersebar dan terintegrasi secara kompleks dalam konstruksi pengetahuan, termasuk dalam praktik medis dan psikologis serta dalam disiplin akademis. Dalam studi-kasusnya, Foucault memaparkan bagaimana institusi-institusi seperti rumah sakit dan sekolah dapat mempromosikan konsepsi tertentu tentang kebenaran dan pengendalian jiwa.

Kemudian Foucault juga menekankan pentingnya sejarah dalam memahami kekuasaan dalam pengetahuan. Dalam "Kekuasaan dan Pengetahuan," Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan berubah dan berkembang secara historis, terutama dalam hubungannya dengan kategori-kategori pengetahuan seperti ilmu alam dan fisika. Selain itu, ia juga meneliti sejarah pendidikan dan teks-teks filsafat Barat untuk

menemukan asal-usul pemikiran modern yang memengaruhi konstruksi pengetahuan.

Analisis kekuasaan dalam pengetahuan Foucault didorong oleh pendekatan historis. Foucault (2002) melihat kekuasaan dan pengetahuan sebagai produk dari kondisi sejarah khusus yang membentuk praktek-praktek kekuasaan tertentu pada masa-masa tertentu.

Ia juga memperlihatkan bahwa pengetahuan selalu berkaitan dengan sosial, politik dan juga ekonomi, dan bahwa kekuasaan terintegrasi secara kompleks dalam kemasyarakatan. Dalam masyarakat dan kekuasaan ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dapat diekstraksi dari masyarakat karena ia terkait dengan kategori pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang pandemi yang memengaruhi bagaimana kita mengelola penanganan pandemi.

Foucault menekankan bahwa pengetahuan juga membentuk kekuasaan. Ia berfokus pada bagaimana pengetahuan memainkan peran penting dalam membentuk identitas, produksi, dan relasi kekuasaan, misalnya lewat proses rekayasa sosial yang memandu pengetahuan tentang tradisi, budaya dan agama. Pandangan Foucault tentang kekuasaan dalam pengetahuan juga membahas peran media masa dan propaganda dalam membentuk pengetahuan dan opini publik.

B. Relasi Kuasa Antara Pemimpin Dusun dengan Tokoh Masyarakat Dusun Kalisidi

Dari berbagai dusun yang ada di Desa Kalisidi, Dusun Kalisidi memiliki keunikan tersendiri daripada dusun-dusun lainnya. Selain satu-satunya Dusun yang masih sangat kental dengan budaya, tradisi dan kegiatan keagamaanya, Dusun Kalisidi adalah satu-satunya dusun yang terdapat pondok pesantren tahfidzul qur'an. Pondok pesantren yang sudah lama berdiri tersebut juga aktif untuk menyelenggarakan majelis ilmu kepada masyarakat setempat. Masyarakat dusun kalisidi sendiri memiliki

karakter yang religius. Berbagai kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Kalisidi selalu tidak pernah kehilangan para jamaahnya. Di sisi lain, masyarakat Dusun Kalisidi juga masih sangat kental akan sikap *unggah-ungguh* kepada yang lebih tua terlebih dengan tokoh agama yang di tokohkan oleh masyarakat sekitar.

Dengan latar belakang yang religius, selain pemimpin formal di lembaga pemerintahan desa, masyarakat Dusun Kalisidi sendiri memiliki pemimpin non formal yang keberadaannya jauh lebih disegani dan diterima daripada pemimpin sah dari lembaga pemerintahan desa setempat. Hal tersebut memang sudah menjadi karakter masyarakat Dusun Kalisidi sejak lama. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, seluruh informan menjelaskan bahwa terdapat tokoh agama yang memang keberadaannya memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Dusun Kalisidi. Berikut hasil dari beberapa wawancara bersama informan :

“kalo disini pemimpin informalnya mbah yai. Tokoh tersebut memang ada karena disinikan banyak kyai. Ada yang paling sepuh mbah khumaidi, pak jumaidi, mbah badar, mbah mudin” (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

“ada, tokoh tersebut di masyarakat lebih di segani dan diikuti seperti Mbah Khumaidi, Pak Jumaidi, Pak Ghofar, Pak Dulloh” (Wawancara Ibu Tantri, Kepala Dusun, 21 Maret 2023)

Karena masih sangat kental dengan ajaran agama, keberadaan tokoh agama menjadi penting di Dusun Kalisidi. Hal tersebut kemudian menjadikan masyarakat Dusun Kalisidi lebih mengikuti apa yang menjadi *dawuh* dari tokoh agama tersebut. seperti yang disampaikan oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut :

“tokoh masyarakat non formal, sorry saya melihatnya disini, tanpa mengesampingkan ya. Keputusan tokoh ini tadi lebih dipandang atau lebih diikuti daripada struktural pemerintahan yang ada. meskipun ketokohan tersebut yakin tak jamin tidak akan membangkang

keputusan tersebut. dadi gak mungkin trus mentahi “halah opowi” gak pernah. tetapi arahan, nasihat dari ketokohan lebih diterima di masyarakat sini. wes nek angger mbah yai yang menyampaikan balasanya pasti sederhana “oh nggeh nderek” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain mengatakan bahwa tokoh agama di Dusun Kalisidi memiliki kedudukan tersendiri dalam masyarakat setempat, seringkali apa yang dibilang oleh tokoh tersebut akan lebih dipercaya dan lebih diikuti oleh masyarakat Dusun Kalisidi, seperti pada wawancara sebagai berikut :

“... soalnya mereka (para tokoh agama) kayak punya power tersendiri sih, jadi masyarakat lebih gampang percaya dengan tokoh agama, kayak oh tokoh itu ngomong gini ayo kita lakukan gitu daripada kalau yang ngomong kayak ketua RT atau RW sendiri” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Kemudian di lain informan menyatakan bahwa tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam masyarakat Dusun Kalisidi, karena karakter masyarakat Dusun Kalisidi masih kental dengan ajaran agama. Seperti yang disampaikan informan dalam proses wawancara sebagai berikut :

“karena disini agamanya masih kental dan sangat memakai paham agama, jadi di sini ada tokoh yang memang sangat memiliki pengaruh di dalam masyarakat Dusun Kalisidi, seperti pak yai” (Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Kemudian informan lain menyatakan bahwa sikap masyarakat yang tunduk dan *manut* dengan apa yang sudah di ajarkan oleh tokoh agama tersebut tidak lain karena sudah menjadi tradisi turun temurun sejak lama. Seperti yang di sampaikan informan pada proses wawancara sebagai berikut:

“kalau menurut saya (keberadaan tokoh tersebut) penting karna mungkin sudah sejak lama dan dari turun temurun ya berhubung di dusun 6 in terbilang religius ya jadi kalau tidak ada tokoh agama kok kayak kurang”

(Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

Masyarakat Dusun Kalisidi sangat menganggap bahwa tokoh tersebut dalam kedudukannya di Dusun Kalisidi sangat penting. Karena masyarakat Dusun Kalisidi sering meminta saran dan juga pendapat sebagai pertimbangan untuk melakukan sebuah kegiatan dan keputusan musyawarah yang ada. Seringkali berbagai persoalan yang sudah di musyawarahkan pasti hasil keputusan akan di konsultasikan terlebih dahulu ke tokoh agama tersebut. meskipun dalam pelaksanaan musyawarah, tokoh tersebut tidak hadir. Seperti yang dijelaskan oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut:

“kalau dalam pemikiranya tokoh tersebut aktif, namun secara fisik memang jarang mengikuti kegiatan musyawarah yang ada karena keterbatasan kesehatan juga. Tetapi hasil dari musyawarah itu selalu dibawa untuk kemudian di konsultasikan sekaligus meminta petunjuk” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

Hal tersebut membuktikan bahwa, tokoh agama di Dusun Kalisidi sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan juga politik di masyarakat dusun Kalisidi. Dalam kegiatan sosial dan politik yang berlangsung di Dusun Kalisidi, tokoh tersebut juga ikut aktif dan berperan penting. Terlebih dalam perihal kegiatan keagamaan juga, masyarakat Dusun Kalisidi sering berpatokan apa yang menjadi keputusan tokoh agama setempat. Seperti yang disampaikan informan dalam proses wawancara seperti berikut:

“itu tergantung problem yang di musyawarahkan, kalau saya sih contoh ya kalau saat masalah kurban itukan juga ada syarat-syarat buat zakat fitrah lebih diutamakan pendapatnya tokoh agama itu” (Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

Selain aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada, tokoh agama yang ditokohkan oleh masyarakat Dusun Kalisidi juga terdapat beberapa

yang ikut aktif di dalam kegiatan politik. seperti ikut dalam keanggotaan partai dan juga menjadi pengurus di salah satu partai politik yang ada. seperti yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“ya memang betul tokoh tersebut masuk dalam kepengurusan partai dan sudah istiqomah ke salah satu partai. Seluruh masyarakat disini juga sudah pada tahu tokoh tersebut memlih ke partai apa”(Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

“masuk dalam partai kayak pak ju itu ketua umum suriah PPP, terus pak go juga pengurus PPP” (Wawancara Ibu Tantri, Kepala Dusun, 21 Maret 2023”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di Dusun Kalisidi sebagian juga terlobat aktif dalam kegiatan partai dan politik. hal tersebut juga sudah menjadi rahasia umum dan sebagian besar masyarakat Dusun Kalisidi sudah mengetahui hal tersebut.

Dalam kegiatan politik yang ada di Dusun Kalisidi termasuk musyawarah dan forum diskusi lainnya, tokoh-tokoh tersebut pasti dilibatkan dalam setiap kegiatan musyawarah yang ada. Terlebih pada saat proses pengambilan keputusan, seperti pada saat rapat pembahasan tentang pembayaran makam gumuk, yang baru-baru ini dibahas. Tokoh tersebut mempunyai posisi penting karena setiap ingin mencapai mufakat besarama, keputusan tersebut pasti di konfirmasi kembali dengan tokoh masyarakat Dusun Kalisidi. Namun dari berbagai musyawarah dan kegiatan politik yang ada, tokoh tersebut seringkali bersifat netral atau tidak memrprioritaskan kepentingan tertentu dan tidak memiliki keberpihakan dalam kebijakan dan keputusan. Berikut hasil dari wawancara :

“tidak pernah ada keberpihakan seperti itu, kalau penyaluran aspirasi pasti tidak pernah ada keberpihakan seperti itu, kalau penyaluran aspirasi pasti yo punya pemikiran sendiri-sendiri, tapi yo tidak untuk menonjolkan kepentingan pribadi yo tidak. Karena sifat beliau itu

sebagai payung atau dalam arti mengayomi” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

“gak, gak ada keberpihakan politik seperti itu, gak terlalu saklek gitu” (Wawancara Ibu Tantri, Kepala Dusun, 21 Maret 2023”

Namun informan lain mengatakan bahwa tokoh tersebut memiliki keberpihakan dalam politik seperti hasil wawancara sebagai berikut :

“jelas ada sih, kayak pak Abdullah itu anggota BPD. sejauh yang saya lihat, dia kan background nya kan NU sama PKB jadi dia tu kalo memutuskan tu juga sesuai dengan orang2 yang sepemikiran” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh informan lain sebagai berikut:

“kalau keberpihakan politik ya tetep ada ya kak, karena diakan (tokoh agama) dukungnya itu ya kak, cuman kalau ke masyarakat kembali ke diri sendiri, meskipun pak yai itu dukungnya politik A trus kita harus ikut kan enggak. Walaupun terkadang beliau juga menyarankan “(Wawancara Ibu Deswi Puji, Kepala RA, 23 Maret 2023)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa tokoh masyarakat Dusun Kalisidi yang masuk di dalam dunia politik termasuk keanggotaan partai seringkali memiliki keberpihakan politik dengan latar belakang yang di yakini. Terkadang tokoh masyarakat tersebut menyarankan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi pilihannya. Namun kembali ke masyarakat, hal tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk memilih apa yang ingin dipilih. Terdapat beberapa resepon masyarakat yang mengetahui tokoh tersebut memiliki keberpihakan politik, namun kebanyakan masyarakat merespon hal tersebut dengan positif karena masyarakat yakin bahwa tokoh masyarakat tersebut tidak akan menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“ya berhubung saya tu warga yang awam ya jadi manut lah, maksudnya kalau tokoh agama tu ya yaudah lah tokoh agama kan gamungkin menjerumuskan ke hal yang tidak baik” (Wawancara Mas Rikza Ahmad Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun musyawarah yang diadakan ditingkat RT maupun RW, seringkali masyarakat Dusun Kalisidi dalam melaksanakannya memiliki beberpa pedoman tertentu yang dijadikan sebuah kiblat acara ataupun kegiatan tersebut. Seringkali kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada tokoh masyarakat Dusun Kalisidi. Seperti yang disampaikan oleh informan pada proses wawancara sebagai berikut :

“ada, kiblatnya ke mbah yai” (Wawancara Gilang, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

“sama dengan jawaban yang sebelumnya tergantung kegiatannya mengarah kemana ke keagamaan atau ke kemasyarakatan. Kalau ke kegiatan agama ya tetep menganut ke suatu pedoman tersendiri, tapi kalau kegiatan kemasyarakatan yang sekiranya yang penting tidak keluar dari adat” (Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

“karena disini itu mengacu ke norma agama. Norma sosial kan mengikuti norma agama. Jadi ya masih ada pak yai”(Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

Pada historis dalam riwayat penjabatan kepala dusun yang mana Dusun Kalisidi dari dulunya belum pernah dipimpin oleh Kepala Dusun yang berjenis kelamin perempuan. Namun pada tahun 2020 kemarin, untuk pertama kalinya Dusun Kalisidi dipimpin oleh Kepala Dusun yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini pasti akan menjadi polemic bagi masyarakat Dusun Kalisidi yang mana realitanya sebenarnya adalah pergerakan perempuan dibatasi di dusun ini. Namun terlihat sampai saat ini, relasi yang terjalin antara Kepala Dusun Kalisidi dengan Tokoh Masyarakat berjalan dengan baik. Masyarakat Dusun Kalisidi tidak pernah melihat adanya ketidak serasian dalam 2 pemimpin yang sangat

berpengaruh di Dusun kalisidi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“*alhamdulillah* sejauh ini hubungan Bu Tantri dengan Pak Yai sangat baik, sangat sinkron” (Wawancara Ibu Mustaanah, Guru MI, 27 Maret 2023)

“hubungannya baik, terbutki sampai saat ini tidak pernah dua unsur tersebut kontra. Saling menguatkan tentunya, untuk masyarakat juga” (Wawancara Bapak Abdur Ghofar, Tokoh Agama, 17 Maret 2023)

“baik-baik saja, tidak ada gep, mlaku bareng” (Wawancara Bapak Abdullah, Ketua BPD Kalisidi, 17 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun untuk pertama kalinya Dusun Kalisidi dipimpin oleh pemimpin perempuan, yang mana sebenarnya perempuan di Dusun Kalisidi masih sangat terbatas pergerakannya terlebih di dalam ranah politik dengan adanya Kepala Dusun perempuan hal tersebut tidak menjadikan sebuah kontra di Dusun Kalisidi sendiri. Karena dari pihak tokoh agama setempat menganjurkan bahwa apapun permasalahan yang menyangkut masyarakat Dusun Kalisidi, harus melalui pertimbangan musyawarah dan tidak diputuskan secara sepihak.

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Yang penting, partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang yang mungkin menjadi anggota dalam sebuah partai atau kelompok aktif dalam sebuah pertemuan musyawarah. Kegiatan politik di Dusun Kalisidi terbilang aktif dan partisipatif. Namun dari segi keterlibatan kegiatan yang menjadi dominasi dari peserta kegiatan merupakan warga laki-laki Dusun Kalisidi. Hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat perempuan Dusun Kalisidi cenderung kurang dilibatkan di berbagai kegiatan seperti kegiatan musyawarah untuk

pengambilan keputusan. Dari informasi yang didapat oleh informan pada proses wawancara, hal tersebut disebabkan karena adanya ajaran-ajaran yang sudah tertanam sejak lama yang bahkan kaum perempuan dan juga laki-laki di Dusun Kalisidi tidak mengetahui awal mula ajaran tersebut di terapkan. Mereka cenderung lebih mengikuti tradisi yang sudah menjadi budaya sejak lama yang ada di Dusun Kalisidi. Hal tersebut kemudian menyebabkan partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi menjadi kurang. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“kalau menurut saya sebenarnya ada (ajaran/aturan/tradisi/norma) cuman hal tersebut udah dari dulu dijalankan. Ya makanya generasi-generasi yang sekarang itu gak ada yang tahu cuman ngikuti ajaran yang sudah ada tapi kan mereka-mereka itu gak tahu dasarnya yang ngajarkan siapa dari siapa dan kapan diajarkannya” (Wawancara Mas Rikza Ahmad, Anggota Karang Taruna, 22 Maret 2023)

“jelas ada sih, kayak norma-norma bahwa perempuan tu seharusnya yah kayak tadi (dirumah saja, melakukan aktivitas didapur) kayak mendukung patrarkis semakin tinggi tuh kek jadi norma-norma yang tidak tertulis yang diucapkan sama mereka, kek aku juga korban jaman kecil kalau patrarkis sekentel itu tapi sekarang sudah agak lumayan ya apalagi semenjak Bu Tantri menjabat menjadi kadus” (Wawancara Mba Zidatul Ulya, Anggota Karang Taruna, 21 Maret 2023)

“... memang di RW 06 ini kan hukum fiqih nya kental ya kak. Itu juga gak cuman di masyarakat tok, tapi di mushola mana saja di RW 06 juga seperti itu. Tidak ada jamaah perempuannya kak. Karena sudah pada tahu hukum fiqihnya bagaimana.” (Wawancara Ibu Deswi Puji, Kepala RA, 23 Maret 2023)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa di Dusun Kalisidi, terdapat ajaran-ajaran yang sudah menjadi tradisi sejak lama yang mana mempengaruhi masyarakat perempuan Dusun Kalisidi dalam melakukan kegiatan khususnya dalam ranah agama dan politik. tidak diperbolehkannya perempuan untuk sholat berjamaah di masjid/mushola terdekat yang ada di lingkungan Dusun Kalisidi kemudian menjadikan

perempuan di Dusun Kalisidi kurang dilibatkan dalam kegiatan sosial dan politik yang berlangsung terlebih dalam musyawarah untuk memutuskan kebijakan. Namun jika dalam kegiatan tersebut terdapat adanya urusan dalam persoalan konsumsi, perempuan Dusun Kalisidi akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, adanya karakter pada masyarakat Dusun Kalisidi yang lebih mengikuti dan mendengarkan dari apa yang di siarkan oleh tokoh masyarakat setempat khususnya tokoh agama yang menjadikan pemimpin formal di tingkat Dusun kurang begitu memiliki power yang lebih untuk memimpin masyarakat Dusun kalisidi.

Hasil penelitian ini diatas menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault bahwa Michel Foucault dalam teorinya membahas tentang relasi kuasa yang mengatakan jika kuasa/kekuasaan bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, melainkan sebuah sistem yang melibatkan segala aspek yang ada di dalamnya, termasuk interaksi antara pemimpin formal yaitu Kepala Dusun Kalisidi dengan pemimpin informal di Dusun Kalisidi yaitu Pak Kyai. Hubungan relasi kuasa antara pemimpin formal dengan pemimpin informal di Dusun Kalisidi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemimpin formal atau Kepala Dusun Kalisidi memiliki kekuasaan yang diberikan oleh lembaga atau organisasi yang diwakilinya, yang mencakup kebijakan, peraturan, dan struktur organisasi. Namun, pemimpin informal atau tokoh masyarakat dapat memiliki kekuasaan yang berasal dari posisi mereka sebagai pemimpin dalam masyarakat, kelompok atau komunitas tertentu.
2. Peran pemimpin informal atau tokoh masyarakat dusun Kalisidi sering kali kepemimpinannya yang tidak terstruktur. Namun dalam posisi masyarakat, keberadaannya sangat dibutuhkan dan disegani. Kemudian mereka dapat memanfaatkan kekuatan relasional mereka untuk

mempengaruhi keputusan dan tindakan dari pemimpin formal yang berlaku. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Dusun Kalisidi yang mana bahwa segala keputusan hasil dari musyawarah yang mempengaruhi kehidupan sosial, agama, dan politik akan selalu di bawa ke tokoh masyarakat setempat untuk meminta saran dan masukan dari keputusan/tindakan yang akan dijalani. Hal tersebut menunjukkan secara tidak langsung pemimpin informal Dusun kalisidi menjadi penentu kebijakan dan juga tindakan.

3. Dalam beberapa kasus di Dusun Kalisidi, pemimpin formal/Kepala Dusun dan pemimpin informal/Pak Kyai bisa saling bergantung satu sama lain. Pemimpin formal memerlukan pemimpin informal untuk menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, sedangkan pemimpin informal memerlukan keterlibatan pemimpin formal untuk memberikan akses pada sumber daya dan keuntungan instansi.

Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa antara pemimpin formal dan informal di Dusun Kalisidi merupakan hal yang kompleks. Pemimpin formal dan informal saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, pemimpin formal harus memahami dan memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin informal untuk memastikan keberhasilan sesuatu yang sedang atau akan di capai.

Teori relasi kuasa Michel Foucault dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara pemimpin informal dan pemimpin formal di Dusun Kalisidi. Foucault menunjukkan bahwa kuasa bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu, tetapi sebuah hubungan yang tercipta antara individu-individu di dalam suatu komunitas, kelompok, kumpulan. Oleh karena itu, pemimpin informal dan

formal di Dusun Kalisidi harus dipahami melalui hubungan kuasa yang mereka bentuk dengan anggota masyarakat.

Pemimpin informal di Dusun Kalisidi biasanya memiliki kuasa yang bersifat personal dan dominasi moral. Mereka memperoleh kepercayaan dan pengaruh melalui kedekatan personal dengan masyarakat setempat, serta kemampuan mereka untuk mempertahankan adat dan tradisi lokal. Hal tersebut sangat sesuai dengan latar belakang Dusun Kalisidi. Namun, kuasa pemimpin informal dapat berubah-ubah tergantung pada dukungan dan kepercayaan yang mereka dapatkan dari masyarakat.

Sementara itu, pemimpin formal di desa memiliki kuasa yang bersifat institusional dan legal. Mereka dipilih melalui proses demokratis dan harus menaati aturan hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kuasa pemimpin formal didasarkan pada posisi dan otoritas mereka di dalam struktur pemerintahan desa.

Namun, Foucault menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya dimiliki oleh pemimpin formal atau institusi, tetapi juga tercipta melalui hubungan-hubungan di antara individu di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin informal dan formal di Dusun Kalisidi tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dianalisis melalui hubungan-hubungan kuasa yang tercipta antara mereka dan anggota masyarakat.

Pada akhirnya, analisis teori relasi kuasa Michel Foucault dapat membantu penulis memahami perbedaan antara pemimpin informal dan pemimpin formal di Dusun Kalisidi. Dengan memahami hubungan-hubungan kuasa yang tercipta antara mereka dan masyarakat, penulis dapat memahami bagaimana kuasa di dalam Dusun Kalisidi tercipta dan dipertahankan. Hal ini dapat membantu penulis untuk mengetahui bagaimana keadaan demokrasi di Dusun Kalisidi khususnya pada tingkat partisipasi politik perempuan di masyarakat.

Teori relai kuasa Michel Foucault mengajukan bahwa kekuasaan tidak hanya dipunyai oleh individu tertentu, tetapi melintasi struktur sosial dan terletak pada hubungan antara individu-individu. Dalam hal ini, pemimpin informal dan pemimpin formal di Dusun Kalisidi dapat dipahami sebagai sosok yang memegang peran penting dalam distribusi kekuasaan.

Pemimpin informal di Dusun Kalisidi dapat merujuk pada individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh signifikan dalam masyarakat Dusun Kalisidi tanpa memiliki jabatan formal sebagai pemimpin seperti layaknya Kepala Dusun. Mereka merupakan tokoh agama, yang memiliki pengalaman atau wawasan yang luas dalam bidang keagamaan yang menjadi penting di dalam kehidupan Dusun Kalisidi yang mana Dusun Kalisidi sendiri sangat kental dengan kegiatan keagamaannya. Dalam pandangan Foucault, pemimpin informal ini dapat dianggap sebagai agen kekuasaan yang memegang pengaruh dalam proses pembentukan pengetahuan, nilai, dan sikap masyarakat Dusun Kalisidi.

Di sisi lain, pemimpin formal di Dusun Kalisidi yaitu Kepala Dusun yang mempunyai kewenangan formal dalam pengambilan keputusan dan pemberian arahan kepada masyarakat. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Foucault, kekuasaan tidak hanya datang dari posisi formal dalam struktur sosial, tetapi juga ditemukan dalam hubungan antara orang-orang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengenai partisipasi politik perempuan dan relasi kuasa serta akses perempuan dalam politik desa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi dan akses perempuan dalam politik desa di Dusun Kalisidi, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tergolong rendah karena adanya budaya yang telah lama ada di dusun kalisidi khususnya pada para perempuan Dusun Kalisidi yang dibatasi pergerakannya dalam kegiatan politik. Budaya ini tidak dituliskan secara tersurat namun karena sudah menjadi budaya turun-temurun menjadikan budaya tersebut langgeng dalam masyarakat Dusun Kalisidi. Seperti contoh terdapat ajaran-ajaran agama yang sudah sejak lama ada seperti tidak diperbolehkannya perempuan untuk sholat fardhu berjamaah di masjid, kemudian tidak adanya perkumpulan rutin untuk perempuan seperti tingkat dusun maupun desa. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat perempuan Dusun Kalisidi merasa bahwa mereka hanya cocok dan pantas melakukan kegiatan di dalam rumah saja. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk perempuan di Dusun kalisidi dilibatkan dalam setiap kegiatan politik yang ada seperti jika terdapat musyawarah dusun atau hal-hal yang menyangkut kegiatan ataupun acara di tingkat dusun. Karena adanya ajaran agama yang memang sudah menjadi tradisi di Dusun kalisidi yang memiliki latarbelakang agama yang kental. Masyarakat yang terikat dengan budaya patriarki cenderung melihat posisi perempuan di politik sebagai minoritas, bahkan menganggap peran perempuan di politik sebagai hal yang tidak penting atau hanya sebatas pelengkap saja.

2. Relasi kuasa antara Kepala Dusun dengan pemimpin non-formal di Dusun Kalisidi memiliki dinamika yang kompleks. Adanya relasi kuasa antara Kepala Dusun dengan Pemimpin non-formal merupakan hasil dari penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sistem kekuasaan tersebut menciptakan struktur relasi kuasa yang lebih menguntungkan masyarakat laki-laki Dusun Kalisidi dan merugikan perempuan di Dusun Kalisidi. Akibatnya, perempuan cenderung menyerahkan hak politiknya kepada masyarakat laki-laki yang keberadaannya lebih diakui dibandingkan masyarakat perempuan. Selain itu, masyarakat Dusun Kalisidi yang lebih mengakui keberadaan pemimpin non-formal dibandingkan dengan pemimpin formal yang berlaku di Dusun Kalisidi membuat partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi menjadi rendah karena selain adanya budaya patriarki yang kental, perempuan di Dusun Kalisidi cenderung merasa tidak memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki,. Hal ini kemudian menimbulkan adanya ketimpangan kekuasaan yang terdapat dalam struktur politik dan sosial di masyarakat Dusun Kalisidi. Namun terlepas dari adanya keberagaman antara Kepala Dusun Kalisidi dengan Pemimpin non formal dalam kaitannya dengan Dusun Kalisidi relasi kuasa antara pemimpin formal dan non formal dapat mempengaruhi kebijakan Dusun Kalisidi, pengambilan keputusan, pemanfaatan sumberdaya, dan bahkan tatanan sosial dan budaya di Dusun Kalisidi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi politik khususnya pada masyarakat perempuan Dusun Kalisidi.
2. Mendorong adanya kesetaraan gender dan perlahan memerangi budaya patriarki di Dusun Kalisidi melalui pendidikan.
3. Melalui program-program Dusun yang lebih baik, lebih partisipatif, dan memnuhi program responsif gender perlu mengupayakan

jaringan informasi yang transparan dan terbuka untuk mengakomodir partisipasi dan aspirasi masyarakat Dusun Kalisidi serta memberikan keterbukaan kepada Masyarakat Dusun Kalisidi dalam berpartisipasi politik.

4. Bagi Kepala Dusun dan pemimpin non formal untuk mengakui kekuasaan masing-masing dan bekerja sama dalam mengembangkan Dusun Kalisidi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abhipraya, F. A., Khatami, u. I., & Iqbal, M. H. (2021). Representasi Relasi Kuasa dalam Kelompok Masyarakat pada Film Tilik. *Jurnal ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1.
- Afandi, A. K. (2011). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 01. No. 02.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti. (2012). *Buku Ajaran Asuhan Kebidanan Ibu 1 (Kehamilan)*. Yogyakarta: Rahima Press.
- Barus, V. C. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa. *Skripsi*, Universitas Medan Area.
- Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Bimo, W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, I. P. (2013). Revisi Taksonomi Pembelajaran S. Bloom. *Jurnal Satya Widya*, Vol. 29 No. 01.
- Fatim, K. S. (2017). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Menggosok Gigi Terhadap Kemampuan Menggosok Gigi Pada Anak TK B. *Jurnal Keperawatan*, 10(2), 13-13.
- Foucault, M. (1972). *Archeology of knowledge* . New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1997). *Seks dan Kekuasaan*,. Jakarta: PT Gramedia,.

- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault, M. (2007). *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibah, S. (2015). Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik. *A Maiyah*, Vol. 8, No. 2.
- Hariyanti, Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civic : Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 1.
- Hidayah, N., & Munandar, M. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Desa Tasik Agung Dalam Berpartisipasi Politik. *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 2 No. 1.
- Indonesia, K. B. (1991). *Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta.
- J. Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Al-Khitabah*, Vol. 3 No. 1.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Open Journal Systems*, Vol. 3 No. 3.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Jurnal Political Science*, Vol. 3 No. 1.
- Malihah, E. (2011). Partisipasi Politik Perempuan dalam Konstruksi Sosial Budaya Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 9, No. 3 .
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.

- Mubarak, I. (2011). *Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. Jakarta: PT. Salemba Medika.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nastian, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 1.
- Notoatmodjo, S. (2013). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka.
- Nurhalimah, A. (2018). Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 2.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.*, Vol. 1, No. 1.
- Royandi, E., & Satria, A. S. (2018). Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 8, No. 2.
- Subagyo, J. P. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan dalam Pemilu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.
- The Liang Gie. (1999). *Pengantar Ilmu Filsafat*. Yogyakarta: Liberty,.

- Thomas, L., & Wareing, S. (2004). *Language, Society and Power An Introduction*. London: Routledge.
- Undang Undang Dasar*. (1945). Indonesia, Republik Indonesia: Pasal 1 Ayat 2.
- Wandalibrata, M. P. (2019). Kajian Metafisika “Relasi Kuasa” dalam Pemikiran Michel Foucault. *Jurnal Cakrawati*, Vol. 02, No. 01.
- Widyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik : Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL*, Vol. 4, No.
- Windhu, I. M. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yandy, E. T., & Mustajab, M. (2019). Perempuan Dalam partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 6 No. 2,.

LAMPIRAN

NO RW : 006

NO	NO RT	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	RT 01	147	127	274
2	RT 02	82	75	157
3	RT 03	141	155	296
4	RT 04	137	112	249
5	RT 05	147	144	291
JUMLAH RW 06		654	613	1.267

(Jumlah penduduk Dusun Kalisidi)

NO RW : 006		Belum Sekolah												Jelum Tamat SD/MI			SD/MI			SMP/MTS			SMA/SMK/MA			DIPLOMA II/II			D III/S. MUDA			DIPLOMA IV/ S 1			JUMLAH		
NO	RT	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P	P	L	L+P
1	1	29	25	54	19	19	38	46	40	86	28	27	55	22	21	43	0	0	0	1	1	2	3	2	5	145	133	278									
2	2	21	13	34	9	9	18	20	29	49	26	15	41	5	9	14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	81	75	156									
3	3	36	45	81	21	21	42	32	44	76	33	35	68	18	13	31	1	0	1	1	1	2	2	0	2	142	159	301									
4	4	34	17	51	16	16	32	36	36	72	28	32	60	22	14	36	1	0	1	1	1	2	1	0	1	138	116	254									
5	5	34	32	66	12	12	24	52	46	98	30	39	69	16	12	28	0	0	0	1	0	1	1	2	3	145	141	286									
JML RW: 6		154	132	286	77	77	154	186	195	381	145	148	293	83	69	152	2	0	2	4	3	7	8	5	13	651	624	1275									

(Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Kalisidi)

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KALISIDI
KECAMATAN UNGERAN BARTAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019**

Desa : Kalisidi
Kecamatan : Ungaran Barat
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

NO	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH	
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11		
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH														
A. DATA PEMILIH														
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	Laki-laki	127	204	266	161	276	208	214	243	149	240	229	2317
		Perempuan	118	232	251	176	272	231	230	244	154	223	241	2372
		Jumlah	245	436	517	337	548	439	444	487	303	463	470	4689
B. PENGGUNA HAK PILIH														
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Laki-laki											0	
		Perempuan											0	
		Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT	251	447	530	345	562	450	455	499	311	475	482	4807	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												0	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa												0	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	251	447	530	345	562	450	455	499	311	475	482	4807	
III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KALISIDI														
NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA														
01	DIMAS PRAYITNO PUTRA, SE												0	
02	AHMAD ANIQ												0	
IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
A.	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01 + IV.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(Data Hak Pilih Masyarakat Dusun Kalisidi dalam Pemilu Kepala Desa tahun 2019)



(Proses Wawancara dengan Kepala Dusun Ibu Fles Wan Tantri, S.H.)



(Proses wawancara dengan Kepala BPD Desa Kalisidi Bapak Abdullah Suyuti, S.Ag.)



(Wawancara dengan Ibu Mustaanah, S.Pd.I)



(Proses Wawancara dengan Tokoh masyarakat, Bapak Abdul Ghofar)



(Wawancara dengan Ibu Deswi Puji, S.Pd.I)



(Wawancara dengan Mba Kharisatul Mamnuniyah, S.Pd.I)



(Wawancara dengan Mas M. Alvin Alexandra)



(Wawancara dengan Mba Zidatul Ulya, S.H)



(Wawancara dengan Mas Rikza Ahmad Aby A, S.T)



(Wawancara dengan Mas Gilang Saputra H)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 357/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

06 Februari 2023

Yth.
Kepala Desa Kalisidi
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi mulai dari tanggal 7 Februari - 7 April 2023 yang berjudul "**Partisipasi Politik Perempuan (Studi Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik Desa**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Erina Milata El Hasna
NIM : 1906016135
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 24 April 2001
CP/e-mail : 0895414227342
Nama Ayah/ Ibu : Drs. Sugiyanto
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tugurejo-Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kasubag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN UNGARAN BARAT
DESA KALISIDI**

Jl. Intan Raya No. 1 Kalisidi, telp/sms/wa : 0896 9221 0080,
e-mail : pemdeskalisidi@gmail.com // ig : @pemdes_kalisidi

Nomor : 021/III/2023

Desa Kalisidi, 21 Maret 2023

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo
Di Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor:
357/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang
ditujukan kepada kami oleh mahasiswa bapak/ibu, atas nama :

Nama : Erina Milata El Hasna
NIM : 1906016135
Jurusan : Ilmu Politik

Dengan ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk
melaksanakan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan judul "Partisipasi
Politik Perempuan (Studi Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Politik
Desa) di Desa Kalisidi dari tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 7 April
2023.

Demikian surat ijin ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan
dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Narasumber

Nama :

Pekerjaan :

Status :

Daftar Pertanyaan

Partisipasi Politik

1. Apakah bapak/ibu pernah ikut musyawarah yang ada di Dusun?
2. Apakah musyawarah ditingkat dusun diadakan secara rutin?
3. Apa topik terpenting atau yang sering dibahas dalam musyawarah tersebut?
4. Bagaimana masyarakat dusun (khususnya perempuan) menyampaikan aspirasinya pada pihak yang bertanggung jawab? Melalui musyawarah dusun atau kumpulan rutin PKK dll?
5. Menurut bapak/ibu apakah musyawarah dusun tersebut cukup mewakili berbagai kepentingan?
6. Apakah partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi berjalan dengan baik?
7. Adakah diantara para peserta musyawarah yang harus diprioritaskan pendapatnya?
8. Apakah seluruh perempuan dilibatkan dalam setiap kegiatan politik atau hanya perwakilan saja? Proses mengundangnya bagaimana? Apa pertimbangannya?
9. Siapa yang memimpin berjalannya musyawarah dusun?
10. Apakah ada pedoman tertentu untuk mengatur jalannya partisipasi politik di Dusun Kalisidi?
11. Menurut bapak/ibu sosok pemimpin Dusun Kalisidi bagaimana?

12. Sejauh ini, partisipasi politik perempuan di Dusun Kalisidi apakah sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?

Relasi Kuasa

1. Menurut bapak/ibu, selain birokrasi dusun siapa saja yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Dusun Kalisidi? Tokoh adat, Tokoh masyarakat, Pemuka agama, dll.
2. Apakah kehadiran tokoh tersebut dalam masyarakat Dusun Kalisidi sangat penting?
3. Apakah tokoh tersebut aktif dalam kegiatan politik yang ada?
4. Apakah tokoh tersebut memiliki keberpihakan politik? Bisa dalam kebijakan atau lebih memprioritaskan kepentingan tertentu atau tidak.
5. Bagaimana respon bapak/ibu ketika tokoh tersebut memiliki keberpihakan politik?
6. Apakah masyarakat Dusun Kalisidi memiliki kiblat tertentu untuk berpedoman dalam melakukan kegiatan?
7. Sejauh ini apakah tokoh tersebut memiliki hubungan erat dengan politisi?
8. Menurut bapak/ibu, bagaimana relasi yang terjalin antara tokoh tersebut dengan kepala dusun?
9. Menurut bapak/ibu, apakah ada etika, budaya, ajaran-ajaran, aturan atau nilai-nilai yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan oleh tokoh tersebut kemudian menyebabkan ketimpangan sosial antara laki-laki dengan perempuan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erina Milata El Hasna
Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 24 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Manalagi Barat RT 02 RW 02, Kelurahan Tugurejo,
Kecamatan Tugu, Kota Semarang
Alamat Email : erinamilata@gmail.com

PENDIDIKAN

2006-2007 : TK Puspitasari Rembang
2008-2011 : SDN Ngotet Rembang
2011-2013 : SDN Purwoyoso 01 Semarang
2014-2016 : MTs Darul Amanah Kendal
2017-2019 : MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
2019-2023 : UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

2021-2022 : Wakil Bendahara Komunitas Sosial IntuisiKita
2021-2022 : Anggota Devisi Sosial-Masyarakat HMJ Ilmu Politik UIN
Walisongo
2020-2021 : Koordinator Devisi Minat Bakat Ikatan Alumni Salafiyah UIN
Walisongo